



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

**LAPORAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SALATIGA
TAHUN ANGGARAN 2024**

(UNAUDITED)

DAFTAR ISI	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	08
SAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Misi dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.1.1 Misi dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Tujuan Utama Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN	1
SAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	9
2.1 Ekonomi Makro	9
2.2 Kebijakan Keuangan	10
2.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan	10
2.2.2 Kebijakan Anggaran Belanja	10
2.2.3 Kebijakan Anggaran Pembiayaan	10
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	20
SAB III IKHTISAK CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	23
3.1 Pengelompokan Pendapatan Daerah	23
3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2004	23
3.2 Pengelompokan Belanja Daerah	27
3.2.1 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2004	27
3.2.2 Pemenuhan yang Dilengkapi Dengan Pengendalian Keuangan Daerah	28
SAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	24
4.1 Fungsi Akuntansi dan Peran Pelayanan Keuangan Daerah	24
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	26
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	26
4.3.1 Pengukuran Aset	26
4.3.2 Pengukuran Kewajiban	27
4.3.3 Ekuivalensi Densi	27
4.3.4 Pengukuran Partisipatif LRA	27
4.3.5 Belanja	28
SAB V PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN	29
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	29
5.1.1 Pendapatan	29
5.1.2 Belanja	31
5.2 PENJELASAN POS-POS AKBACA	44
5.2.1 APBD	44
5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	60
5.3.1 Kegiatan Operasional	60
5.3.2 Kegiatan Non Operasional	67
5.3.3 Surplus / Defisit LJO	68
5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	68
5.4.1 Ekuivalensi Aset	68
5.4.2 Dampak Konsolidasi Perubahan Kebijakan Akuntansi	69
5.4.2.1 Akutik Transak Hibana-Balok	72
5.4.2.2 RK Perbaikan	72
5.4.2.3 NEK Aset	72



1.4.1.4 RUK PPKD	73
1.4.4 KEDITTAN ASBRIK	73
SAB VI INFORMASI NON KEUANGAN	74
4.1 Laporan Dan Tasa Kerja OPD Tahun 2024	74
4.2 Rencana Strategis TIPO	76
4.3 Informasi Non Keuangan Lainnya	77
SAB VII PENUTUP	81

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Unaudited Dinas Perhubungan Kota Salatiga yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan saya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan sesuai layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Salatiga,

**KAPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SALATIGA**

Dr. SEI SATUTI, MM

Pejabat Utama Muda

NIP. 19070021994012007

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kota Solatiga disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Solatiga selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengetahui efektivitas dan efisiensi cara-cara antara pelaporan dan membantu menentukan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Dinas Perhubungan Kota Solatiga menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan akuntansi, sosial, maupun politik dengan:

- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan status dana pemerintah.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan status dana pemerintah.
- Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian realisasi terhadap anggarannya.
- Menyediakan informasi mengenai cara-cara antara pelaporan realisasi akuntabilitasnya dan memenuhinya kewajiban lainnya.
- Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- Menyediakan informasi yang berguna untuk mengetahui kemampuan antara pelaporan dalam memenuhi akuntabilitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Perkot Solatiga disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah serta peraturan perbendaharaan daerah, terdiri atas:

- Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021;
- Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Piutang dan Penyisihan Dana Bergilir pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pengawasan Penerimaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendidikan dan Lainnya Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyetaraan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Salawaja, Perusahaan Terbatas Pusat Katering dan Perum Perumahan Jawa Tengah dan Perusahaan Terbatas Bank Perumahan Daerah Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyetaraan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perumahan Rakyat Bank Salatiga;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Perumahan;



20. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi dan Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Gedung dan Perbaikan Fasilitas Fisik yang Mendapatkan Koneksi di Kawasan Perkotaan Kabupaten Daerah, sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Walikota Soligra Nomor 40 Tahun 2020;
21. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kebijakan Anggaran Nomor 10 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 90 Tahun 2020 tentang Sistem Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
23. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 27 Tahun 2021 tentang Kerangka Konseptual Kebijakan Anggaran Pemerintah Kota Soligra;
24. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anggaran Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan;
25. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anggaran Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran;
26. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anggaran Nomor 3 Tentang Nomenklatur;
27. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anggaran Nomor 4 Tentang Laporan Arah Kas;
28. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anggaran Nomor 5 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan;
29. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anggaran Nomor 6 Tentang Anggaran pendapatan;
30. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anggaran Nomor 7 Tentang Belanja dan Belanja;
31. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anggaran Nomor 8 Tentang Anggaran Pembelian;
32. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anggaran Nomor 9 Tentang Anggaran Aset;
33. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anggaran Nomor 10 Tentang Anggaran Kewajiban;
34. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anggaran Nomor 11 Tentang Anggaran Ekuitas;
35. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anggaran Nomor 12 Tentang Kerangka Kualitatif, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Perubahan Estimasi Anggaran, dan Operasi yang Tidak Dilaksanakan;
36. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anggaran Nomor 13 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasi;
37. Peraturan Wali Kota Soligra Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anggaran Nomor 14 Tentang Laporan Operasional;



38. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 15 Tentang Laporan Perilaku Sederhana Anggaran KBB (LPSA3);
39. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 17 Tentang Perjanjian Jasa Kewas-Perbarui Kewas;
40. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 18 Tentang Akuntansi Proyek Investasi;
41. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 19 Tentang Peristiwa Setelah Tanggal Neraca;
42. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 76 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Anggaran;
43. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 77 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Perkapitan;
44. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Bantuan;
45. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 79 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Transfer;
46. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pembayaran;
47. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Kas dan Setor Kas;
48. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 82 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pinjam;
49. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 83 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Persewaan;
50. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 84 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Investasi;
51. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 85 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Aset Tetap;
52. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 86 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud;
53. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 87 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Dana Cadangan;
54. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Aset Lainnya;
55. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Kewajiban;
56. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Koneksi Keseluruhan;
57. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 91 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Konsolidasi;
58. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 92 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Koneksi Jasa dan;
59. Peraturan Wali Kota Soligyo Nomor 93 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Properti Investasi;



60. Peraturan Walikota Salitiga Nomor 18 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Bupati Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
61. Peraturan Wali Kota Salitiga Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Salitiga Nomor 4 Tahun 2024.
62. Peraturan Wali Kota Salitiga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Penghasilan Kemangan Daerah.
63. Peraturan Wali Kota Salitiga Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Bupati Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
64. Peraturan Wali Kota Salitiga Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
65. Peraturan Wali Kota Salitiga Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salitiga Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Bagas Akar Standar.
66. Peraturan Wali Kota Salitiga Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Salitiga Nomor 47 Tahun 2024.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Nomor 71 Tahun 2021 tentang standar akuntansi pemerintah, maka sistematisasi isi Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Perbukuan Kota Salitiga adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan Tanggung Jawab
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematisasi Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II. RENCANA MASYARAKAT, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekuitas Mekanis
- 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan
 - 2.2.2 Kebijakan Anggaran Belanja



2.2.3 Kebijakan Anggaran Pembelian

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III. IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan

3.1.2 Permasalahan yang dihadapi

3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

3.2.1 Target dan Realisasi Belanja

3.2.2 Permasalahan yang dihadapi

Bab IV. KEBUANGAN AKUNTANSI

4.1 Lembar Akuntansi dan Lembar Pelaporan

4.2 Basis Akuntansi yang Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pengukuran Aset

4.3.2 Pengukuran Kewajiban

4.3.3 Pengukuran Ekuitas

4.3.4 Pengukuran Pendapatan LRA

4.3.5 Pengukuran Belanja

4.3.6 Pengukuran Pendapatan LD

4.3.7 Pengukuran Biaya

Bab V. PENYILANGAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-pos LRA

5.1.1 Pendapatan

5.1.2 Belanja

5.1.3 Pembayaran

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

5.2.1 Aset

5.2.2 Kewajiban

5.2.3 Ekuitas

5.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

5.3.1 Kegiatan Operasional

5.3.2 Kegiatan Non Operasional

5.3.3 Pro/Contra Biaya

5.3.4 Surplus/Defisit LD

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.4.1 Ekuitas Awal

5.4.2 Surplus/Defisit-LD

5.4.3 Dampak Kamataif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Menduaai



5.4.4. HUKUM NIBR

Hal VI. INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Organisasi dan Tata Kerja OPD Tahun 2024
- 6.2. Rencana Strategis OPD
- 6.3. Informasi Non Keuangan Lainnya

Hal VII. PENUTUP

Lampiran-lampiran

- 1) Perjanjian Layanan Realisasi APBD
- 2) Rencana LRA Menengah Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembinaan
- 3) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
- 4) Rekapitulasi Pajak PPh PPN
- 5) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SP) Fungsional,
- 6) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Perencanaan (SP) Fungsional;
- 7) Buku Kas-Uraian Bulan Desember 2024 Berdasarkan Pengeluaran;
- 8) Rekapitulasi Belanja Per Jenis Belanja;
- 9) Kutipan Buku Besar tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2024;
- 10) Rekening koran Bendahara Pengeluaran tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2024;
- 11) Rekening koran Bendahara Perencanaan tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2024;
- 12) Tanda Buku Perencanaan Pendapatan tanggal 31 Desember 2024 dan Surat Tanda Setorannya;
- 13) Rekap dan Rencana Pinang Pajak, Ketiadaan dan Pinang lainnya beserta Analisa Uraur Pinang dan *Ageng Sekolah Pinang*;
- 14) Rencana Laporan Persediaan : ATK, dan BAKR, Benda Pos, Perbaikan Rutuh Tangga, Cetakan, Karan, Mat dan Bahan Kebersihan, HPA, Obat, dll;
- 15) Berita Acara Perawatun Barang Persebaran dan Rekapitulasi Persediaan Barang secara bulanan;
- 16) Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah termasuk Lampiran dan Pengisian Mutasi / Kardex / Penghapusan Aset;
- 17) Rekapitulasi Penyusutan BMD;
- 18) Laporan Aset tetap (masuk, tambah dan reduksi barang);
- 19) Daftar BMD pada program barang aset penghasil;
- 20) Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud)
- 21) Aset Lainnya (Kerjasama dengan Pihak Ketiga);
- 22) Aset Lainnya (Aset Lain-lain);
- 23) Kartu Kerja (identifikasi Properti Investasi);
- 24) Rekapitulasi Hasil Identifikasi Properti Investasi;



- 26) Biaya Acam Serah Terima Barang Penerima;
- 26) Rekapitulasi Belanja Kebaik dan Perbaikan yang dikapitalisasi;
- 27) Rekapitulasi Penulpaan Diterima di muka dan bukti memorial;
- 28) Rekapitulasi Belanja Dibayar Di Muka dan bukti Memorial;
- 29) Rincian Utang Belanja Pegawai, Belanja Asa dan Belanja Modal Serta Dikarenakan Pradukung;
- 30) Buku Memorial Transaksi Perjanjian dan Asuransi;
- 31) Buku Memorial Jurnal Pengakuan Utang Belanja Pegawai dan bukti Tagihan Tagihan, As. Lantik. 81);
- 32) Analisa Vertikal dan Horisontal Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024;



BAB II EKONOMI MAKRO, KESTABILAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1.1 EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar 5,2% sedangkan inflasi sebesar 2,8% dengan nilai tukar rupiah terhadap USD diperkirakan sebesar Rp. 15.000/1USD berdasarkan paparan asumsi dasar makro tahun 2024 yang telah disiapkan oleh Pemerintah dan DPR RI. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan investasi dan perbaikan ekonomi domestik. Perbaikan ekonomi domestik didukung oleh perbaikan pada lapangan usaha. Sejalan dengan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang meningkat, konsumsi rumah tangga dan Lembaga non profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan tercapainya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga melalui Tinjauan Realisasi Inflasi Pasar dan Urahan (TRIP dan TRIU) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Strategi kebijakan utama Bank Indonesia dengan kebijakan Fiskal Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga terus dipantau dalam rangka stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta iklim ekonomi dan keuangan. Kemajuan pemerintah ditargetkan tumbuh sejalan dengan dukungan Pemerintah dalam pembangunan, kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor terutama produk industri. Sementara import juga diperkirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan Endusi transformasi. Pertumbuhan pada lapangan usaha sektor pertanian ditargetkan tumbuh positif sejalan dengan perbaikan dari sisi iklim akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan serta didukung oleh pemenuhan kebutuhan dari Pemerintah kepada sektor pertanian rakyat dan umum serta sektor lainnya. Produk sektor perikanan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih besarnya hilirisasi, pemenuhan domestik dan internasional yang masih kuat untuk ekspor legasi, serta pemenuhan kapasitas seiring dengan penuntasan ombre 2024. Sektor perdagangan besar diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan pemenuhan domestik yang kuat serta didukung oleh perbaikan pada sisi moneter global yang diharapkan dapat memberikan akses terhadap produksi yang lebih kuat kepada manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa Pendidikan tumbuh positif dalam rangka menyediakan sumber daya manusia berkualitas.

Pertumbuhan ekonomi Soligta tahun 2023 yang dirangsang oleh laju pertumbuhan PDRH atas dasar harga konstan 2018 menurut lapangan usaha mengalami pertumbuhan sebesar 3,34 persen. Sebaliknya lapangan usaha mengalami pertumbuhan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum sebesar 11,43% selanjutnya pertumbuhan rendah terjadi pada sektor Perdagangan dan Persewaan yakni sebesar 1,22%.

Sektor Infeksi Pengisian memberikan sumbuang tertinggi terhadap perkembangan Kota Soligta pada tahun 2023, yaitu sebesar 33,10% dengan laju pertumbuhan sebesar 8,80%. Sektor kesehatan dan sektor perdagangan besar dan eceran, seperti retail merupakan sektor yang memberikan sumbuang yang cukup besar yaitu masing-masing sebesar 12,67% dan 12,74% dengan laju pertumbuhan sebesar 4,56% dan 4,40%.

Tabel 2.1 Pertumbuhan PDRH Atas Dasar Harga Konstan (%) 2019-2023

PDRH	2019	2020	2021	2022	2023
PDRH Atas Dasar Harga Konstan (%)	5,9	-0,88	3,35	5,57	3,34

Sumber : <https://soligtagovra.tps.go.id>

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Soligta (198 juta rupiah)

PDRH	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PDRH Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)	12.319,18	12.311,06	13.271,84	14.000,91	15.388,56	15.637,64

Sumber : <https://soligtagovra.tps.go.id>

PDRH per kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan PDRH per kapita menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk atau masyarakat. PDRH per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRH per kapita atau per satu orang penduduk.

PDRH per kapita Kota Soligta pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan.

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

PKBR	2021	2022	2023
PKBR Per Kapita Harga Berikat (juta rupiah)	72,39	78,26	76,51

Sumber : <https://salitgkota.bps.go.id>

Jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga mengalami penurunan di tahun 2016 sampai 2019. Tren penurunan ini sejalan dengan tren penurunan penduduk miskin di Jawa Tengah dan Indonesia secara keseluruhan maupun di atas seban. Namun terjadi peningkatan penduduk miskin di tahun 2020 hingga 2021. Penurunan penduduk miskin di Kota Salatiga tahun 2021 sebesar 5,14 persen hingga kembali ke jumlah di tahun 2016 sebesar 5,24 persen. Pada tahun 2022 dan 2023 jumlahnya sama namun secara persentase mengalami penurunan.

Tabel 2.3 Uraian Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Salatiga 2015-2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2015	357.511	10,00	5,80
2016	342.146	9,70	5,24
2017	290.044	9,59	5,07
2018	380.856	9,24	4,64
2019	418.955	9,21	4,76
2020	454.154	9,69	4,94
2021	480.983	10,14	5,14
2022	518.815	9,48	4,73
2023	562.103	9,48	4,66

Sumber : <https://salitgkota.bps.go.id>

Tabel 2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga dibandingkan Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)		Persentase Penduduk Miskin (%)	
	Salatiga	Jawa Tengah	Salatiga	Jawa Tengah
2019	6,2	1.141,23	4,36	10,80
2020	6,7	1.398,90	4,94	11,41
2021	10,1	4.109,73	5,14	11,79
2022	9,48	1.831,44	4,73	10,93
2023	9,4	1.791,5	4,66	10,77

Sumber : <https://salitgkota.bps.go.id>

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat). IPM merupakan indikator yang mencerminkan kualitas hidup penduduk yang meliputi Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita. IPM Kota Sidoarjo tertinggi di Jawa Timur.

Tabel 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	2020	2021	2022	2023
IPM Kota Sidoarjo	81,14	81,60	84,15	84,99
IPM Jawa Timur	71,58	72,17	72,80	73,18

Sumber : <https://sidajogkota.bps.go.id>

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan persentase jumlah pengangguran dibanding dengan jumlah angkatan-kerja dalam suatu wilayah. Nilai TPT menunjukkan besar kecilnya jumlah pencari tenaga kerja yang belum terserap/ditampung. Menurut BPS pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak sanggup mengikuti pekerjaan, atau sudah dituntut bekerja tetapi belum mulai bekerja.

TPT di Kota Sidoarjo merupakan angka yang semakin meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, di mana angka persingkat tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat kenaikan mencapai sekitar 72 persen dibanding tahun 2019 (atau meningkat 3,1 persen) dan menjadi angka tertinggi dalam kurun waktu tahun 2017-2021. Peningkatan TPT pada tahun 2020 diduga oleh kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19. TPT tahun 2021 sudah mengalami penurunan sebesar 7,26 persen. Hal ini diduga karena kondisi ekonomi dan kinerja pada tahun sebelumnya membaik akibat pandemi Covid-19.

Tabel 2.6 Data jumlah pengangguran terbuka adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pengangguran Terbuka (orang)	TPT (%)
2018	4.948	4,23
2019	4.958	4,13
2020	8.219	7,44
2021	8.147	7,26
2022	6.489	5,38
2023	3.770	4,57

Sumber : <https://sidajogkota.bps.go.id>



Atas Kebijakan Pembangunan Kota Salatiga tahun 2024 dijabarkan untuk "Meningkatkan Insani yang Sehat dan Cerdas Melalui Salatiga yang Berwib, Sehat dan Berbudaya dan Berkeadilan", sehingga pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada:

1. Peningkatan kualitas sekolah terutama pada penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran pada PAUD, disdik dan pendidikan non formal
2. Peningkatan penguatan dan kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik guru PAUD, SD, dan SMP
3. Peningkatan pusat orang tua dalam pendidikan keluarga
4. Pengembangan kearifan budaya lokal sebagai pramen kota Salatiga, kearifan penunjang dalam kerangka Merdeka Belajar
5. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya dan kearifan termasuk kekayaan gastronomi
6. Peningkatan aktivitas keemasan dan budaya dengan fokus pada keemasan tradisional dan budaya lokal
7. Peningkatan kualitas layanan di tingkat pertama untuk meningkatkan kelengkapan lebih di 1000 hari pertama pasca kelahiran baik pada ibu dan bayi
8. Pemertanian gizi buruk, difokuskan pada pemertanian stunting, wasting, underweight, obesitas pada balita dan anak
9. Pemertanian angka kesakitan difokuskan pada pemertanian penyakit menular (Covid-19, TB, HIV/AIDS), pengendalian lingkungan dan perilaku tidak sehat
10. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan fokus peningkatan KD baru (semen terd) peningkatan partisipasi KB pria dan pemertanian kesehatan reproduksi pada remaja
11. Meningkatkan kesejahteraan sosial, kearifan gender dan pembangunan anak, dalam rangka mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Layak Anak
12. Peningkatan ketahanan stakeholder dalam pencapaian kesejahteraan sosial dengan memperbaiki kemampuan PMKS untuk nilai tambah, serta dukungan berbagai program PMKS
13. Akselerasi pemertanian sub-bah anak dengan prioritas pada anak-anak korban kekerasan termasuk TPO, difabel dan anak-anak rentan
14. Penguatan pengertanian gender dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan penguatan perempuan di berbagai bidang pembangunan
15. Peningkatan pemertanian pangan bagi masyarakat yang bergizi, bergizi seimbang dan aman dalam rangka meningkatkan konsumsi energi dan protein masyarakat
16. Peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang
17. Peningkatan wawasan kebangsaan yang mengoptimalisasi pemertanian dan kearifan warga Salatiga

Secara ringkas pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan antara 4,32 – 4,10%
2. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,71 – 5,20%
3. Pertumbuhan ekonomi antara 5,28 – 5,80%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 82,18
5. Indeks Pembangunan Gender sebesar 95,50
6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 76,48
7. Pertumbuhan nilai investasi sebesar 18,21%

2.1 KEBELAKANGAN KEUANGAN

Berdasarkan analisis terhadap indikator utama ekonomi Salatiga, memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah, nasional maupun global maka arah pembangunan ekonomi Kota Salatiga diarahkan pada penguatan struktur, penguatan sektor komersial, peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan, keterlibatan perempuan, arah dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah dirumuskan serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kota Salatiga juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, industri kecil dan menengah serta jabatan jasa, pengalihan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan atau politik investasi dalam memperbaiki kesempatan kerja di Kota Salatiga, mendorong terwujud kesempatan kerja daerah melalui pencapaian iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kapasitas bakat dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Fokus kebijakan perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan dan industri kreatifitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat pasca pandemi Covid 19 dan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Salatiga.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. Berpedoman pada RAPIL, RKPD, dan RPAS;
- d. Tepat waktu, sesuai dengan anggaran dan jekel yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- e. Dilakukan secara terarah, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepastian, rasional untuk masyarakat dan tak pada kelemahan pemerintah/pemangku kebijakan; dan
- f. APHE merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perencanaan dan penganggaran daerah.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang berorientasi investasi dan strategi serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta dibarengi pada keberanian diri dalam rangka memungut kebijakan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan menegakkan prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan.

2.2.1 Kebijakan Anggaran Pendapatan

Sumber pendapatan daerah yang merupakan sumber keadilan daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan, adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan koordinasi fiscal romptong akan menjadi sangat penting untuk pemerintah daerah sebagai salah satu sumber kegiatan pembangunan daerah. Pendapatan daerah merupakan salah satu penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memantapkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan kontribusi lebih bagi peningkatan proses pemerataan daerah. Upaya peningkatan etasifikasi dan ekonomisasi PAD dilakukan melalui perimbangan dan peningkatan kinerja BUMD, OPD penghasil dan pengalokasian aset Pemerintah Kota Salatiga.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Salatiga tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, sehingga daerah dan dana perimbangan menjadi optimal.

1. Intensifikasi dan ekonomisasi sumber pendapatan daerah;
2. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pemukiman daerah;
3. Pengembangan sektor swasta dan prosedur untuk peningkatan investasi dan sumber-sumber pendapatan;
4. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana perimbangan;
6. Rasio Fungsional yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

Kebijakan pendapatan difokuskan untuk menyediakan proses pendapatan daerah meliputi:

- a. Optimalisasi pengalokasian sumber-sumber pendapatan daerah (ekonomisasi dan intensifikasi).

- b. Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan dan pengurusan aset daerah yang meliputi gaji dan benefit gaji.
- c. Peningkatan Sistem Pelayanan perizinan yang tertanam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- e. Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil.
- f. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana sumber pendapatan daerah.

2.2.2 Kebijakan Anggaran Belanja

Dalam rangka energi dan penyelesaian, akuisi anggaran untuk setiap perangkat daerah dibentuk berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta tidak dibedakan berdasarkan pemenuhan posmenas atau perangkat daerah atau berdasarkan akuisi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Kebijakan ini terdapat, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah mengorganisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan keberatan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kemitatan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belajar *mandatory spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pendekatan sumber pembangunan, serta harus mengorganisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dibekalkan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Menurut Peraturan Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (4), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk merencanakan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pemenuhan pembangunan daerah.



Struktur Belanja Daerah dalam APBD (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1) huruf d):

1. **Belanja Operasi**, merupakan pengalokasian anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek;

a. **Belanja Pegawai** pada belanja operasi adalah untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, adapun rinciannya adalah:

1) Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pembaruan gaji ketagihan dan tunjangan lain;

2) Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk menutupi kebutuhan pengupahan Calon ASN sesuai format pegawai tahun 2024;

3) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, pensiun pegawai dengan memperhatikan acuan yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

4) Penyelenggaraan dan peningkatan prestasi kesehatan;

b. **Belanja Honorarium dan Jasa**

Belanja honorarium dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengalokasian honorarium/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk honorarium/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat pihak ketiga/ pihak lain;

c. **Belanja Bangunan**

Belanja bangunan digunakan untuk menganggarkan pembayaran biaya utang yang dibayar atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. **Belanja Subsidi**

Belanja subsidi hanya dipergunakan untuk subsidi produksi/ berbagai bentuk yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang disubsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak;

e. **Belanja Hibah**

Alokasi Hibah lebih berdasarkan pada ketentuan Perundang-Perundang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Perundang-Perundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

C. Belanja Bantuan Sosial

Alasan Belanja Bantuan Sosial berdasarkan (yaitu Peraturan) Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Perubahan Himpun dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi:

Belanja modal digunakan untuk menanggung biaya pembelian yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dan tidak minimal kapabilitas aset yang dipertimbangkan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pemertahanan kawasan daerah.

- a. Belanja Modal Tanah, digunakan untuk menanggung biaya yang diperoleh dengan sukund untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

- b. Belanja Modal Perbaikan dan Minor, digunakan untuk menanggung biaya perbaikan dan mesin termasuk mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung, digunakan untuk menanggung biaya gedung dan bangunan termasuk seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan sukund untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

- d. Belanja Modal Jalan, Teras, dan Jembatan, digunakan untuk menanggung biaya jalan, teras, dan jembatan termasuk jalan, teras, dan jembatan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menanggung aset tetap lainnya termasuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

- E. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menanggung aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos-aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terbagi, merupakan pengeluaran anggaran atau beban APBD untuk keperluan daerah termasuk keperluan meslek yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta penggantian atau kelebihan pembayaran atau Pembayaran Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran daerah yang berasal di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya serta sesuai peraturan perundang-undangan dan/ atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila tersedia akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran yang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, Belanja transfer dibagi atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

2.2.3 Kebijakan Anggaran Pembinaan

Aras kebijakan pembinaan daerah meliputi kebijakan pemertuan pembayar dan kebijakan pengeluaran pembayar daerah. Kebijakan pemertuan pembayar yang akan dibicarakan terkait dengan kebijakan pemertuan *visu lebih* pembagian anggaran tahun sebelumnya (SLPA), pemertuan dana ulangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pemertuan pinjaman daerah, pemertuan kembali pemberian pinjaman, pemertuan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan defisit masih menggunakan kebijakan pemertuan yang pengalokasian program dan kegiatan yang disahkan oleh Masyarakat melalui Musrenbang dan Anggaran Dewan melalui Pokir yang sudah disesuaikan dengan arah kebijakan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dimungkinkan dalam KUA PPAS serta analisis kemampuan fiskal oleh Badan Pengalokasian Keuangan dan Pendapatan Daerah. Untuk SLPA pada struktur APBD dibuat sama dengan defisit belanja.

Kebijakan pengeluaran pembayar daerah menyangkut pemertakan atau cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pajak utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembayar diokasionkan pada tahun yang dapat dimanfaatkan untuk menugaskan kemampuan keuangan daerah dan mengurangi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan daerah dilakukan dengan melakukan pemertakan penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.

digunakan untuk menganggarkan manfaat ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pemenuhan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengalokasian pembiayaan daerah seperti penyelesaian pembiayaan pokok utang dan pembayaran modal.

1.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.117.000.000,00 (realisasi) sebesar Rp2.218.441.200,00 atau sebesar 104,79%.

Anggaran Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.169.209.413,00 direalisasikan Rp10.898.206.746,00 (97,57%). Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi, dengan total anggaran sebesar Rp7.775.204.677,00 (rupiah milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga) dengan realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar Rp7.302.212.010,00 (rupiah milyar lima ratus lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) atau 93,91% yang merupakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
 - Anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp4.601.976.156,00 (rupiah milyar empat ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp4.294.475.215,00 (rupiah milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga) atau 93,54%.
 - Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.174.312.319,00 (tiga milyar seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) dengan realisasi sebesar Rp3.110.714.742,00 (tiga milyar seratus sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) atau 98%.
- b. Belanja Modal, dengan total anggaran Rp3.392.994.736,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh enam) dengan realisasi Rp3.392.994.736,00 (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh enam) atau 100%.

BAB III IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Target pendapatan Otas Perhubungan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.117.000.000,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta rupiah), target tersebut terdiri dari:

No	Jenis Pendapatan	Target
A	RETRIBUSI JASA UMUM	2.100.000.000,00
1.	Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.100.000.000,00
B	RETRIBUSI JASA USAHA	17.000.000,00
2.	Retribusi Pelayanan Lampu Klakson Parkir	17.000.000,00
JUMLAH		2.117.000.000,00

3.1.1 TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2024

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

Target : Rp2.117.000.000,00

Realisasi : Rp2.218.441.200,00

Persentase : 104,79%

Realisasi pencapaian target pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp2.218.441.200,00 atau sebesar 104,79% bila dibandingkan dengan target pendapatannya sebesar Rp2.117.000.000,00 adalah realisasi tersebut terdiri dari:

No	Jenis Retribusi	2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Retribusi Daerah	2.117.000.000,00	2.218.441.200,00	104,78	1.417.094.000,00
A	RETRIBUSI JASA UMUM	2.100.000.000,00	2.195.298.000,00	104,14	1.503.137.000,00
1	Retribusi Pelayanan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.100.000.000,00	2.195.298.000,00	104,14	1.207.307.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kerjasama Harmerat	0,00	0,00	0,00	277.730.000,00



B	KETRIBUSI JASA USAHA	17.000.000,00	15.316.000,00	100,17	93.997.000,00
1	Ketribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Perseorangan dan Bus Linas	0,00	0,00	0,00	40.550.000,00
2	Ketribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00	0,00	0,00	30.275.000,00
3	Ketribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	17.000.000,00	15.316.000,00	100,17	9.172.000,00
C	RETRIBUSI PERJINAN TERENTU	0,00	0,00	0,00	19.900.000,00
1	Ketribusi LRA Trayak untuk Memfasilitasi Pelayanan Angkutan Linas	0,00	0,00	0,00	19.900.000,00
D	LAIN LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAMA	0,00	1.527.200,00	0,00	
	Hasil sewa BMD	0,00	1.527.200,00	0,00	
	Jumlah	2.217.000.000,00	2.210.441.200,00	104,79	1.617.064.000,00

Hasil sewa BMD sewa WC Terminal Terminal Jember tidak menjadi target pendapatan sehingga dimasukkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah yang sah.

3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah Tahun 2024 diarahkan untuk memandu Kabupaten Bengkulu Daya Perhubungan Kota Selatiga dalam rangka melaksanakan Tugas Pemerintahan, Partisipasi dan Pelayanan masyarakat yang terdiri dari Operasi dan Belanja Modal.

3.2.1 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2024

A. Belanja Daerah

Target	: Rp1.109.289.413,00
Realisasi	: Rp809.000.744,00
Persentase	: 97,57 %

B. Belanja Operasi

Target	: Rp7.736.294.677,00
Realisasi	: Rp7.505.212.010,00
Persentase	: 96,51%

Terdapat:

- 1) Belanja Pegawai
 - Target : Rp1.601.976.358,00
 - Realisasi : Rp1.561.478.218,00
 - Persentase : 97,49%
- 2) Belanja Barang dan Jasa
 - Target : Rp1.134.318.219,00
 - Realisasi : Rp1.101.713.792,00
 - Persentase : 96,98%
- 3) Belanja Modal
 - Target : Rp1.302.994.736,00
 - Realisasi : Rp1.302.994.736,00
 - Persentase : 100%

3.2.2. Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Permasalahan adalah:

- 1) Mencari dan menggali potensi retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- 2) Meningkatkan pengkolektoran pendapatan daerah.
- 3) Mengembangkan fasilitas umum dan jasa yang dapat meningkatkan sumber-sumber pendapatan.
- 4) Tetap aktif menawarkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif.
- 5) Mencari SUM yang memadai sesuai kebutuhan.
- 6) Membuat dan mengontrol standar kebutuhan pegawai ke SKPSUM Kota Soligra.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan/ Pegawai Negeri/ Pegawai Swasta dan unit lainnya yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan untuk dipergunakan pada entitas pelaporan. Sedangkan entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Salatiga, dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga, maka yang termasuk menjadi Entitas Akuntansi adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, terdiri dari:

1. Sekretariat DPRD
2. Sekretariat Daerah
3. Inspektori Daerah
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Anak, Pengendalian Perkotaan, dan Keluarga Berencana
5. Dinas Pendidikan
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Sosial
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10. Dinas Lingkungan Hidup
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Perencanaan dan Keuangan
13. Dinas Kependidikan dan Olahraga
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Dinas Perdagangan
17. Dinas Pangan dan Pertanian



18. Dinas Pelayanan Umum dan Protokoler Ruang
19. Dinas Kepresidenan Usaha Kecil dan Menengah
20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21. Dinas Perhubungan
22. Dinas Perindustrian dan Urugan Kerja
23. Badan Pengabdian Keuangan dan Pendidikan Daerah
24. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Kasutan Bangsa dan Politik
27. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah
28. Kecamatan Argorejo
29. Kecamatan Solompe
30. Kecamatan Tingkir
31. Kecamatan Sidomukti

Sebagai contoh pelaporan adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dalam hal ini adalah Badan Pengabdian Keuangan dan Pendidikan Daerah (BPKPD).

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUNJAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kota Solatiga adalah basis akrual. Fungsi pelaporan menyediakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban dan liabilitas. Fungsi pelaporan yang menyediakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

Komponen yang terdapat dalam satu set laporan Keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan



4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASAKI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1 Pengukuran Aset

- Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- Pembiayaan
 - Utang berjangka apabila:
 - Utang saat penyiapan menjadi potensi kerugian masa depan diperoleh tanpa Pelaporan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat dicatat dengan andal;
 - Utang saat diterima atau nilai keperluannya dan nilai kepenggunaannya terpisahkan:
 - Pembiayaan berjangka pada saat dipakai, dijual, kadaluarsa, hilang dan rusak;
 - Pengikatan Sertifikat Persewaan menggunakan perolehan aset
 - Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
 - Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila perolehan aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap diukur pada nilai wajar pada saat perolehan; Biaya perolehan aset tetap yang dibayarkan dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya pemecatan dan penggantian perlengkapan, tenaga kerja, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkaitan dengan perolehan aset tetap tersebut;
 - Ara pemeliharaan masa manfaat dalam hal terdapat perbaikan aset tetap yang jumlah nilai masa manfaat (nilai buku aset tetap ditambah penambahan masa manfaat karena perbaikan aset tetap) melebihi atau ekвивалентно aset tetap maka masa manfaat aset tetap sama dengan masa ekonomis aset tetap;
 - Pendapatan adalah semua penerimaan Kebijakan Kas (uang) Utang yang menambah ekuitas dan linear dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
 - Sementara pendapatan diklasifikasi berdasarkan atas bentuk, yaitu dengan membedakan penerimaan bentuk, dan tidak mencantumkan jumlah bebaya (selisih dikompensasikan dengan pengalangan)

4.3.2 Pengaliran Kemajmbaan

Kemajmbaan dialirkan sebesar nilai nominal. Kemajmbaan dalam mata uang asing dipisahkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Pengaliran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.3 Ekuitas Dana

Ekuitas dana terdiri dari:

a) Ekuitas

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

b) Ekuitas dana

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi pemilikan, aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

d) Ekuitas dana

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah cadangan yang ditunjuk dalam periode berjalan.

4.3.4 Pengaliran Pendapatan LRA

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak atas daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan terjadi penerimaan daerah, pengalirannya sebagai berikut:

a) Pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima oleh rekening kas umum daerah
2. Diterima oleh SKPD
3. Diterima secara kas oleh pemerintah daerah atas nama BLD

b) Pendapatan LO diakui pada saat:

Terdapatnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih timbulnya atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c) Pendapatan LRA dan Pendapatan LO dibukukan berdasarkan aset bruto, yaitu dengan menyukutkan penerimaan bruto dan tidak mengurangi jumlah neraca (selisih dikompensasi dengan pengaliran).

d) Pengaliran pendapatan yang pembayarannya di bayar di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode kedepan.

4.3.5 Belanja

Perkiraan ikhtisam belanja mencakup defisit, pengikatan, pengeluaran dan pendian, penyajian dan pengungkapan. Pengikatan atau belanja adalah sebagai berikut :

- Belanja dikata pada saat terjadinya pengikatan dari rekening kas
- Pengikatan melalui Belanja: Pengeluaran: pengikatannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atau pengeluaran tersebut diadkan oleh unit yang mempunyai fungsi pertanggungjawaban.
- Pengikatan belanja dicatat sebesar kas yang dikurangkan dari rekening
- Pengikatan belanja dalam bentuk barang jasa dicatat sebesar nilai barang jasa yang diserahkan. Apabila dalam bentuk surat-surah surat tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasa maka dapat dilakukan perakuan atas nilai barang dan atau jasa yang diserahkan.
- Pengikatan belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas.
- Pengikatan belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengikatan aset tetap.

Pengungkapan belanja adalah sebagai berikut :

- Pengikatan belanja selain bekeaman setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target realisasi belanja
- Informasi lainnya yang dianggap perlu
- Biaya jasa biaya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB V PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Kinerja Anggaran

5.1.1 Pendapatan Rp2.218.443.300,00

Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Solo adalah Rp2.218.443.300,00 dari target anggaran senilai Rp2.117.000.000,00 atau sekitar 104,79%. Adapun rincian pendapikannya sebagai berikut:

Pendapatan Kontribusi Daerah

Pendapatan Kontribusi Daerah milik Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

A. RETRIBUSI JASA LAIN-LAIN

1. Kontribusi Pelayanan Publik di Lapangan Umum

No	Jenis Retribusi	2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
A	RETRIBUSI JASA UMUM	2.000.000.000,00	2.180.290.000,00	109,01	1.285.127.000,00
1	Realisasi Pelayanan Pelayanan Publik di Tempat Umum	2.000.000.000,00	2.180.290.000,00	109,01	1.285.127.000,00
2	Realisasi Pelayanan Kembalikan Sewa	0,00	0,00	0,00	227.700.000,00

B. RETRIBUSI JASA USAHA

1. Kontribusi Tempat Khusus Publik

No	Jenis Retribusi	2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
B	RETRIBUSI JASA USAHA	17.000.000,00	18.500.000,00	108,82	93.897.000,00
1	Realisasi Pelayanan Pelayanan Tempat Publik untuk Kembalikan Pemungutan dan Perumahan	0,00	0,00	0,00	67.500.000,00
2	Realisasi Pelayanan Pelayanan Fasilitas Layanan di Lingkungan Terminal	0,00	0,00	0,00	26.397.000,00
3	Realisasi Pelayanan Tempat Khusus Publik	17.000.000,00	18.500.000,00	108,82	9.172.000,00

C. RETRIBUSI PERUBAHAN TERMINAL



No	Jenis Revisi/Realisasi	2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
C	RETRIBUSI PERIJINAN TERPENTU	0,00	0,00	0,00	10.666.000,00
J	Realisasi lain Tingkat untuk Memudahkan Pelayanan Penghasilan Umum	0,00	0,00	0,00	10.666.000,00

D. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAMA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sama

1. Hasil Sewa/BMD

Adapun Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.218.441.200,00 terdiri dari:

No	Jenis Revisi/Realisasi	2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
D	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAMA	0,00	13.827.200,00	0,00	0,00

Dari tabel data data dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Dinas Perbukuan Tahun 2024 adalah senilai Rp2.218.441.200,00 dari target senilai Rp2.177.000.000,00 atau sebesar 101,79%, jika dibandingkan dengan Realisasi pendapatan Tahun 2023 senilai Rp1.870.994.000,00 mengalami kenaikan sebesar 22,99%. Hal ini disebabkan karena kenaikan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.

Pada realisasi pendapatan Tahun 2024 terdapat Pendapatan Asli Daerah yang Sama sebesar Rp2.218.441.200,00 yang berasal dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp2.186.296.000,00; Retribusi Pelayanan Tempat Parkir Khusus Rp18.316.000,00; serta Lain-lain pendapatan asli daerah yang sama (Sewa BMD) sebesar Rp13.827.200,00.



Belanja Tunjangan Keluarga ASN	204.204.874,00	174.438.204,00	85,40	125.636.960,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	107.105.237,00	174.438.204,00	162,99	181.434.864,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1.091.647,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	107.458.800,00	87.458.800,00	81,37	112.352.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	107.458.800,00	87.458.800,00	81,37	112.352.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	40.000.000,00	40.400.000,00	101,24	40.902.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	40.400.000,00	40.400.000,00	100,00	41.000.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.178.000,00	44.875.000,00	87,69	40.312.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.178.000,00	44.875.000,00	87,69	40.312.000,00
Belanja Tunjangan Biaya ASN	104.120.000,00	100.884.440,00	96,81	102.328.160,00
Belanja Tunjangan Biaya PNS	101.412.500,00	99.452.000,00	98,11	101.300.160,00
Belanja Tunjangan Biaya PPPK	224.200,00	631.700,00	28,16	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.000.000,00	1.462.250,00	13,29	6.178.670,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.000.000,00	1.462.250,00	13,29	6.178.670,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembelian Gaji ASN	72.032,00	24.430,00	33,78	24.437,00
Belanja Pembelian Gaji PNS	70.800,00	23.827,00	33,64	24.437,00



	Belanja Pembelian Gaji PPPK	2.572,00	0,00	26,00	0,00
	Belanja Juran				
	Jaminan Kesehatan ASN	129.308.800,00	129.308.418,00	94,82	123.022.170,00
	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PNS	124.000.000,00	127.208.385,00	94,99	123.022.170,00
	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PPPK	2.000.000,00	1.821.033,00	94,31	0,00
	Belanja Juran				
	Jaminan Kesehatan Kerja ASN	5.548.000,00	5.585.292,00	101,75	5.505.261,00
	Belanja Juran Jaminan Kesehatan Kerja PNS	5.000.000,00	5.521.544,00	79,47	5.315.261,00
	Belanja Juran Jaminan Kesehatan Kerja PPPK	148.000,00	61.748,00	44,31	0,00
	Belanja Juran				
	Jaminan Kesehatan ASN	12.471.400,00	18.755.936,00	161,34	9.945.431,00
	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PNS	12.242.716,00	18.178.095,00	161,34	9.945.431,00
	Belanja Juran Jaminan Kesehatan PPPK	228.720,00	585.247,00	101,99	0,00
	Belanja Juran				
	Golongan Perantara				
	Talangan	714.200,00	0,00	0,00	0,00
	Perumahan Rakyat ASN				
	Belanja Juran Golongan Perantara Talangan Perumahan Rakyat PNS	717.140,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Juran Golongan Perantara Talangan Perumahan Rakyat PPPK	717.140,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Tambahan				
	Perumahan ASN	2.827.296.890,00	1.926.431.852,00	69,87	1.901.004.512,00



Tambahan Penghasilan berdasarkan Skema Kerja ASN	740.546.121,00	711.348.826,00	95,00	711.578.488,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Skema Kerja PNS	740.851.143,00	701.451.176,00	94,00	711.370.488,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Skema Kerja PPPK	1.404.970,00	1.409.440,00	99,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kemitia Kerja ASN	111.704.904,00	107.381.978,00	94,40	108.210.621,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kemitia Kerja PNS	111.890.904,00	106.709.978,00	94,36	108.210.621,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kemitia Kerja PPPK	672.000,00	672.000,00	100,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kategori Profesi ASN	78.541.240,00	71.848.786,00	94,00	73.793.910,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kategori Profesi PNS	78.101.240,00	71.858.786,00	91,40	73.794.010,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kategori Profesi PPPK	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan	1.888.454.541,00	1.835.958.244,00	95,00	1.807.432.571,00



Industriasi Persepsi Kerja ASN				
Tambahan Penghasilan Imbalan Kerja PNS	1.871.273.900,00	1.824.777.752,00	97,51	1.967.402.372,00
Tambahan Penghasilan Imbalan Kerja PPPK	11.188.344,00	11.172.512,00	99,07	0,00
Tambahan Penghasilan Industriasi Persepsi Kerja Lainnya ASN	223.455.905,00	223.443.465,00	99,56	103.982.179,00
Belanja bagi ASN atau Instansi Pemangku Rerangka Daerah	223.455.905,00	223.443.465,00	99,56	93.982.929,00
Belanja Instansi bagi ASN atau Pemangku Pajak Pajak	6.308.000,00	6.308.000,00	100%	0,00
Belanja Instansi bagi ASN atau Pemangku Rerangka Jasa Usaha Pelayanan Publik di Tempat Lain	91.258.000,00	91.238.000,00	99,00	42.337.399,00
Belanja Instansi bagi ASN atau Pemangku Rerangka Jasa Usaha Pengoperan Kerjasama Berstruktur	0,00	0,00	0,00	1.763.600,00
Belanja Instansi bagi ASN atau Pemangku Rerangka Jasa Usaha Terpadu	142.905,00	142.905,00	100,00	1.216.400,00
Belanja Instansi bagi ASN atau Pemangku Rerangka Jasa Usaha Tempat Khusus Publik	1.023.000,00	794.560,00	77,67	423.754,00



	Belanja Investasi bagi ASN atau Penerimaan Retribusi Perizinan Tambahan dan Tradisional, Monev/evaluasi Pelayanan Aplikasi Lisensi	0,00	0,00	0,00	238.284,00
	Belanja Honorarium	24.226.000,00	23.568.800,00	96,87	62.592.150,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawab Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kegiatan	22.707.000,00	21.851.000,00	96,27	36.962.000,00
	Belanja Honorarium Pengabdian Masyarakat	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	15.630.150,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan KEM/KEDE	1.425.595,00	1.427.095,00	99,77	4.441.000,00
3	Belanja Investasi bagi KEM/KEDE atau Penerimaan Retribusi Daerah bagi KEM/KEDE	1.425.595,00	1.427.095,00	99,77	4.441.000,00
	Belanja Investasi bagi KEM/KEDE atau Penerimaan Retribusi Daerah untuk Pelayanan Publik di Tipe Jalan Hijau	7.200.000,00	7.226.000,00	100,36	7.412.200,00
	Belanja Investasi bagi KEM/KEDE atau Penerimaan Retribusi Daerah untuk Penyelenggaraan Kegiatan Binaan	0,00	0,00	0,00	710.000,00
	Belanja Investasi bagi KEM/KEDE atau Penerimaan Retribusi Daerah untuk Usaha Tradisional	48.595,00	48.595,00	100,00	245.000,00
	Belanja Investasi bagi KEM/KEDE atau Penerimaan Retribusi	77.000,00	59.500,00	77,27	32.000,00

	Item Usaha Tetap Klasifikasi				
	Bahaya Kecelakaan KENDARAAN Perawatan Rutin Pemeriksaan Teknis Item Tetap untuk Monyvitor Pelayanan Angkutan Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.934,00

5.1.2.1.3 Belanja Barang dan Jasa Rp3.101.733.792,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.118.733.792,00 dari anggaran sebesar Rp3.134.103.319,00 atau 99,83% dengan rincian per kegiatan sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	2024			Realisasi 2023 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	BELANJA BARANG DAN JASA	2.176.318.218,00	2.118.733.792,00	97,30	2.232.001.001,00
4	BELANJA BARANG	290.170.007,00	754.005.932,00	07,30	2.420.054.382,00
1.	Bahaya Bahaya-Bahaya Bahan Peledak	113.827.541,00	105.008.332,00	92,25	120.543.331,00
2.	Bahaya Bahaya dan Tanggung Jawab	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.000.000,00
3.	Bahaya Bahaya-Bahaya Lainnya	6.227.000,00	6.287.600,00	99,35	3.000.000,00
4.	Bahaya Suku Cadang Suku Cadang Alat Angkutan	41.330.700,00	30.140.830,00	85,07	33.121.000,00
5.	Bahaya Suku Cadang Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	12.124.000,00
6.	Bahaya Alat Bahan untuk Kegiatan Kerusi-Alat Tulis Kantor	15.321.000,00	15.325.000,00	100,00	50.000.000,00
7.	Bahaya Alat Bahan untuk Kegiatan Kerusi-Kertas dan Cover	15.871.000,00	15.071.000,00	100,00	900.000,00



No	Jenis Kegiatan	2014			Realisasi 2013 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
6.	Bekas Alat Bantu untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	167.811.961,00	166.307.100,00	97,99	2.266.761,00
8.	Bekas Alat Bantu untuk Kegiatan Kantor - Ruang Piv	2.020.000,00	2.000.000,00	99,31	5.000.000,00
10.	Bekas Alat Bantu untuk Kegiatan Kantor - Ruang Komputer	16.697.300,00	16.577.400,00	99,29	11.000.000,00
11.	Bekas Alat Bantu untuk Kegiatan Kantor - Peranti Kantor	0,00	0,00	0,00	95.000,00
12.	Bekas Alat Bantu untuk Kegiatan Kantor - alat Lunak	7.517.000,00	7.011.000,00	93,25	5.555.000,00
13.	Bekas Alat Bantu untuk Kegiatan Kantor - Perengkapan Dinas	4.490.000,00	4.490.000,00	100,00	0,00
14.	Bekas Alat Bantu untuk Kegiatan Kantor - Sewa/ Sewa lalu	900.000,00	900.000,00	100,00	0,00
15.	Bekas Alat Bantu untuk Kegiatan Kantor - Alat Bantu untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.090.000,00	6.090.000,00	66,99	3.750.000,00
16.	Bekas Barang untuk Dijual/Dicorbankan seperti Mesin Cetak	176.700.000,00	176.700.000,00	100,00	2.010.150.234,00
17.	Bekas Sisa Pakan- Makan	300.000,00	300.000,00	100,00	100.000,00
18.	Bekas Makanan dan Minuman Rapat	127.797.000,00	125.576.120,00	97,90	101.400.000,00
19.	Bekas Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.857.000,00	6.090.000,00	77,39	6.750.000,00
20.	Bekas Pakan dan Bahan (POH)	40.267.000,00	40.267.000,00	100,00	0,00

No	Jenis Kegiatan	2014			Realisasi 2013 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
21	Bekas Sewing Tail Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	164.130.000,00
22	Bekas Komputer Komputer Rumah Rumah	0,00	0,00	0,00	164.130.000,00
E	BELANJA BASA	1.097.004.210,00	1.048.804.170,00	95,52	1.050.166.000,00
	BELANJA BASA KANTOR	1.180.821.804,00	1.075.704.792,00	91,13	1.104.151.000,00
1.	Honorarium Mensan dan atau Pembatas, Miskramet, Pembatas, dan Pantol	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	1.400.000,00
2.	Bekas jasa tenaga administrasi	625.724.346,00	625.724.346,00	100,00	192.947.400,00
3.	Bekas jasa tenaga teknis	96.619.024,00	96.619.024,00	100,00	54.363.400,00
4.	Bekas jasa tenaga keamanan	37.305.514,00	37.305.514,00	100,00	47.674.000,00
5.	Bekas jasa lain Pembelian Perawatan	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
6.	Bekas jasa kehumasan	9.000.000,00	0,000.000,00	0,00	0,000.000,00
7.	Bekas kegiatan olahraga	1.000.000,00	1.315.400,00	131,54	720.100,00
8.	Bekas kegiatan ke- sibuan	12.000.000,00	8.520.700,00	71,00	10.470.000,00
9.	Bekas kegiatan Lain-lain	36.000.000,00	47.148.400,00	131,25	45.020.000,00
10.	Bekas kegiatan Jurnalisme Kultur populer	1.140.000,00	1.070.000,00	93,86	1.160.000,00
11.	Bekas Paket Pengiriman	100.000,00	75.000,00	75,00	0,00
12.	Bekas Penyelidikan Daya	0,00	0,00	0,00	70.200.000,00
13.	Bekas penelitian pajak, dan atau pelayanan	16.170.000,00	12.000.000,00	74,28	15.000.000,00



No	Jenis Kegiatan	2014			Realisasi 2013 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
14	Bekasja Lainnya	293.794.000,00	261.360.000,00	89,31	211.141.000,00
	Bekasja Daras	94.702.000,00	61.202.000,00	64,62	45.102.000,00
	Jaminan Asuransi				
	Bekasja Daras Jaminan	20.710.000,00	23.070.000,00	111,40	23.024.710,00
15	Kesejahteraan bagi Non ASN				
	Bekasja Daras Jaminan	1.633.400,00	1.436.777,34	87,95	1.176.474,00
16	Kesejahteraan Kerja bagi Non ASN				
	Bekasja Daras Jaminan	2.022.600,00	1.795.222,66	88,75	1.721.000,00
17	Kemudahan bagi Non ASN				
	Bekasja Asuransi	34.331.020,00	34.331.020,00	100,00	17.062.710,00
	Bekasja Miskin Daerah				
	Bekasja Sewa	92.000.000,00	92.000.000,00	100,00	91.070.000,00
	Perawatan dan Meria				
	Bekasja Sewa	92.000.000,00	92.000.000,00	100,00	60.300.000,00
19	Kondisi dan Perawatan Pemasangan				
	Bekasja Sewa, Lain	0,00	0,00	0,00	22.176.000,00
	Lain-lain Lainnya				
	Sewa Ases Temp	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
	Lain-lain				
21	Bekasja sewa mobil-travel	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	0,00
	Bekasja Jasa	79.302.200,00	79.302.200,00	100,00	32.000.000,00
	Konsultansi				
	Kontrol				
	Bekasja Jasa	79.302.200,00	79.302.200,00	100,00	32.000.000,00
	Konsultansi				
	Perencanaan				
22	Bekasja Jasa				
	Program Penerimaan				
	Kontrol Tahap				
	Sipil Transparansi				
	Bekasja Jasa	154.121.340,00	154.121.340,00	100,00	162.537.200,00
	Konsultansi Non				
	Kontrol				



No	Jenis Kegiatan	2014			Realisasi 2013 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
11	Bahaya Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Perlatan Inkubator	21.363.300,00	21.363.300,00	100,00	0,00
	Bahaya Pemeliharaan Rakula Rakula Laki- Laki dan Dasi	124.541.402,00	124.541.402,00	0,00	170.124.000,00
	Bahaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	156.530.018,00	156.530.002,00	100,00	44.700.000,00
13	Bahaya Pemeliharaan Tempat Kayu Kampung Gedung Kantor	126.530.018,00	126.530.000,00	100,00	44.190.000,00
	Bahaya Perjalanan Dinas	393.650.000,00	293.094.620,00	96,71	150.380.014,00
	Bahaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	393.650.000,00	293.094.620,00	96,71	150.380.014,00
14	Bahaya Perjalanan Dinas Luar	244.620.000,00	233.073.420,00	96,74	104.070.018,00
15	Bahaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00	91.100.000,00
16	Bahaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	47.410.000,00	-42.381.200,00	-87,70	113.000.000,00
	Bahaya Uang dan Aksi Jasa untuk Distribusi Kertas Pihak Ketiga Pihak Lain Masyarakat	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	0,00
17	Bahaya Beasiswa yang tersebut pemeliharaan	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH	3.174.718.319,00	3.116.733.792,00	98,00	1.028.001.200,00

5.1.2.2. Belanja Modal Rp3.392.994.736,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.392.994.736,00 dan anggaran sebesar Rp3.392.994.736,00 atau sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.345.682.500,00	3.345.682.500,00	100,00	1.664.878.940,00
1.	Belanja Modal Alat Penghalang Alat Jalan	345.500.000,00	345.500.000,00	100,00	1.412.650.000,00
2.	Belanja Modal Alat Kerja dan Pemak Tengg	30.950.000,00	30.950.000,00	100,00	0,00
3.	Belanja Alat Komunikasi untuk pemancar	24.350.000,00	24.350.000,00	100,00	0,00
4.	Belanja Modal Komputer	171.300.000,00	171.300.000,00	100,00	27.080.000,00
5.	Belanja Modal Furniture Kantor	2.600.982.500,00	2.600.982.500,00	100,00	223.228.940,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.312.236,00	47.312.236,00	100,00	0,00
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.312.236,00	47.312.236,00	100,00	0,00
	Jumlah Belanja Modal	3.392.994.736,00	3.392.994.736,00	100,00	1.664.878.940,00

5.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp3.345.682.500,00

Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.345.682.500,00 dan anggaran senilai Rp3.345.682.500,00 atau 100%. Adapun Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut terdiri dari:

No	Jenis Barang	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.345.682.500,00	3.345.682.500,00	100,00	1.664.878.940,00
1.	Belanja Modal Alat Penghalang dan Alat Jalan	345.500.000,00	345.500.000,00	100,00	1.412.650.000,00
2.	Belanja Modal Alat Kerja Tengg	30.950.000,00	30.950.000,00	100,00	0,00
3.	Belanja Alat Komunikasi untuk pemancar	24.350.000,00	24.350.000,00	100,00	0,00
4.	Belanja modal Komputer	171.300.000,00	171.300.000,00	100,00	27.080.000,00
5.	Belanja Modal Furniture Kantor	2.600.982.500,00	2.600.982.500,00	100,00	223.228.940,00
	JUNJAH	3.345.682.500,00	3.345.682.500,00	100,00	1.664.878.940,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp47.312.236,00

Realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp47.312.236,00 dari anggaran semula Rp47.312.236,00 atau 100%.

No	Jenis Barang	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.312.236,00	47.312.236,00	100,00	0,00
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	47.312.236,00	47.312.236,00	100,00	0,00
	JUMLAH	47.312.236,00	47.312.236,00	100,00	0,00

5.1.3. Pembayaran Rp0,00

Dinas Perhubungan Tahun 2024 tidak memiliki pembayaran atau senilai Rp0,00.

5.1.4. Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (Rp6.679.765.546,00)

Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SLPA) adalah selisih antara Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2.218.441.201,00 dan ditanggung belanja selama era periode pelaksanaan sebesar Rp10.896.206.746,00. Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Dinas Perhubungan pada 31 Desember 2024 sebesar (Rp6.679.765.546,00) (*Ratus Delapan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ratus Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu*).

5.2. PENJELASAN POS-POS NEKACA

Nekaca Dinas Perhubungan Kota Salatiga menggunakan posisi keuangan anggaran aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2024 dengan uraian sebagai berikut :

5.2.1. ASET Rp8.889.897.471,64

Total Aset Dinas Perhubungan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.889.897.471,64. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH TAHUN 2024 (Rp)	JUMLAH TAHUN 2023 (Rp)
1	Aset Lancar	90.773.313,00	131.712.278,33
2	Aset Tetap	7.466.666.253,06	5.876.362.911,37
3	Aset Lainnya	1.392.457.902,58	1.374.965.382,36
	JUMLAH	8.889.897.471,64	6.789.555.697,28

5.2.1.1. ASET LANCAR Rp90.773.313,00

Jumlah aset lancar Dinas Perhubungan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp90.773.313,00. Aset Lancar tersebut terdiri dari Kas di Handukana



Perencanaan, beban di bayar di muka dan pendapatan, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH TAHUN 2024	JUMLAH TAHUN 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Kas di Bendahara Pembiayaan	0,00	2.765.000,00
2	Belanja Dibayar di muka	12.777.344,57	9.000.000,00
3	Persediaan	71.896.019,40	(23.590.199,41)
	JUMLAH	84.773.364,00	102.174.800,59

5.2.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran..... Rp0,00

Saldo kas IPGCI/TU sebesar Rp0,00 sampai dengan 31 Desember 2024 telah diterima ke Kas Umum Daerah. Saldo rekening tersebut Bendahara pada Dinas Perbukudan Kota Salatiga mempunyai rekening penunjangnya dengan nomor rekening 5-004.12177.5, yang pada tanggal 31 Desember 2024 rekening penunjangnya gaji tersebut mempunyai saldo awal Rp0,00

5.2.1.1.2 Kas di Bendahara Pembiayaan..... Rp 0,00

Kas di Bendahara Pembiayaan Dinas Perbukudan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.2.1.1.3 Belanja di Bayar di Muka..... Rp12.777.344,57

Belanja di Bayar di Muka pada Dinas Perbukudan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.777.344,57. Nilai tersebut berasal dari Premi Asuransi Gedung dan Bangunan, Kesehatan Dinas, dengan rincianya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jangka Waktu	Emasua Premi	Salanja di Bayar di Muka 2024
1.	Prmi Asuransi Kesehatan Dinas	12.061.2024 s.d.12.2025	10.922.973,33	10.133.455,79
	Prmi Asuransi Gedung dan Bangunan	4 Maret 2024 s.d 4 Maret 2025	1.644.378,30	1.566.547,77
	Prmi Asuransi Kesehatan Dinas	4 Maret 2024 s.d 4 Maret 2025	1.761.778,30	1.632.195,79
	Jumlah		24.329.129,93	21.777.344,57



5.2.1.1.4 Perediaan Rp77.996.078,48

Saldo perediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dipadukan/bundling dalam rangka pelayanan kepada masyarakat adalah sejumlah Rp77.996.078,48 per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Jenis Perediaan	Nilai Perediaan 2024 Rp	Nilai Perediaan 2023 Rp
a. Barang Cetak	77.996.078,48	118.170.398,41
b. Material dan benda pos	0,00	310.000,00
c. Perlengkapan pendukung Okolaga	0,00	4.300.000,00
d. Lainnya	0,00	420.000,00
JUMLAH	77.996.078,48	123.500.398,41

5.2.1.1.4.1 Perediaan Barang Cetak Rp77.996.078,48

Nilai perediaan barang cetakan per 31 Desember 2024 yang ada di Dinas Perbukuan Kota Sukatiga sejumlah Rp77.996.078,48 nilai tersebut berasal dari saldo awal senilai Rp118.170.398,41 kemudian terdapat penambahan belanja selama tahun 2024 senilai Rp100.000,00, adapun penggunaan barang cetakan selama tahun 2024 senilai Rp230.000.000,00 sehingga saldo akhir tahun 2024 senilai tersebutnya tersaji sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Belanja	Masa Masa	Pemakaian	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1.	Barang Cetak	118.170.398,41	100.000,00	0,00	230.000.000,00	77.996.078,48

5.2.1.1.4.2 Perediaan Material dan Benda Pos Rp0,00

Nilai perediaan material dan benda pos per 31 Desember 2024 yang ada di Dinas Perbukuan Kota Sukatiga sejumlah Rp0,00, nilai tersebut berasal dari saldo awal senilai Rp250.000,00 kemudian terdapat penambahan belanja selama tahun 2024 senilai Rp2.000.000,00 adapun penggunaan material dan benda pos selama tahun 2024 senilai Rp2.250.000,00, sehingga saldo akhir tahun 2024 senilai Rp0,00. Tabelnya tersaji sebagai berikut:

No	Jenis Barang	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Belanja	Pemakaian	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1.	Perediaan: Material dan benda pos	250.000,00	2.000.000,00	2.250.000,00	0,00

5.1.1.1.4.3 Perediaan Perengkapan Perakting Olahraga Rp0,00

Nilai perediaan perlengkapan perakting olahraga per 31 Desember 2024 yang ada di Dinas Perhubungan Kota Salatiga sejumlah Rp0,00, nilai tersebut berasal dari saldo awal senilai Rp4.500.000,00, kemudian terdapat penambahan belanja selama tahun 2024 senilai Rp0,00. Adapun pengurangan dikarenakan barang perediaan rusak/ rusak sesuai SK. Wali Kota Penetapan Permohonan Hutang MBR Daerah berupa Hutang Perediaan Nomor 001.2.4.11.20 tanggal 25 November 2024, sehingga saldo akhir tahun 2024 senilai Rp0,00. Labelnya teruji sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Belanja	Perediaan rusak/ rusak	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1.	Perlengkapan Perakting Olahraga	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00

5.1.1.1.4.4 Perediaan Cenderamata Rp0,00

Nilai perediaan cenderamata per 31 Desember 2024 yang ada di Dinas Perhubungan Kota Salatiga sejumlah Rp0,00, nilai tersebut berasal dari saldo awal senilai Rp949.000,00, kemudian terdapat penambahan belanja selama tahun 2024 senilai Rp0,00. Adapun pengurangan dikarenakan barang perediaan rusak/ rusak sesuai SK. Wali Kota Penetapan Permohonan Hutang MBR Daerah berupa Hutang Perediaan Nomor 001.2.4.11.20 tanggal 25 November 2024, sehingga saldo akhir tahun 2024 senilai Rp0,00. Labelnya teruji sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Belanja	Perediaan rusak/ rusak	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1.	Perediaan Cenderamata	949.000,00	0,00	949.000,00	0,00

5.1.1.2 ASET TETAP Rp7.406.696.252,66

Saldo Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.406.696.252,66 meningkat sebesar Rp2.527.883.317,89 atau 45,84%, dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.878.812.934,77 dengan rincian sebagai berikut:

	Aset Tetap	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Tanah	1.677.829.696,00	1.677.829.696,00
2	Perediaan dan Vedio	5.728.866.556,66	3.190.983.238,77



3	Gedung dan Bangunan	2.137.001.176,00	1.996.203.676,00
4	Akumulasi depresiasi	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	6.509.308,00	6.509.308,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	189.833.000,00	189.833.000,00
7	Akumulasi Penyusutan	(17.540.879.677,14)	(13.866.121.133,23)
	Jumlah	7.466.063.706,86	6.879.662.918,77

5.1.1.2.1 Tanah Rp1.937.829.000,00

Saldo Aset Tanah pada Dinas Perbukangan Kota Soluligo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.937.829.000,00 tahun-sebelum Rp0,00 atau 0% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.937.829.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tanah	2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	2023 (Rp)
Tanah Perak	1.937.829.000,00	0,00	0,00	1.937.829.000,00
Tanah Sewa Perak	0,00	0,00	0,00	0,00
Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.937.829.000,00	0,00	0,00	1.937.829.000,00

Misalnya Aset Tanah selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	1.937.829.000,00
Penambahan	0,00
Amdah	0,00
Pengurangan	
Mutasi Kelewat antar aset tetap	0,00
Amdah	0,00
Saldo Akhir	1.937.829.000,00

Saldo aset tanah sebesar Rp1.937.829.000,00

5.1.1.2.2 Perlatan dan Meja Rp26.576.595.441,00

Saldo Aset Perlatan dan Meja pada Dinas Perbukangan Kota Soluligo per 31 Desember 2024 sebesar Rp26.576.595.441,00 nilai sebesar Rp1.426.798.441,00 atau 20,21% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.947.841.001,00 dengan rincian sebagai berikut :

Perlatan dan Meja	2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	2023 (Rp)
1. Aset Tetap	423.213.711,00	213.308,00	0,00	211.713.711,00
2. Aset Angkutan	2.766.333.403,00	0,00	0,00	2.766.333.403,00
3. Aset Bangunan dan Alat-alat	21.343.000,00	0,00	0,00	21.343.000,00
4. Aset Keras dan	1.279.473.673,00	82.836.000,00	0,00	1.105.623.673,00



Bentuk Fungsi				
1. Alat Tulis	481.145.300,00	310.422.500,00	0,69	170.721.600,00
Konsumsi Dan Pemasukan				
6. Alat Laboratorium	4.180.400.300,00	545.900.000,00	0,69	3.640.900.300,00
7. Komputer	664.111.750,00	94.100.000,00	0,69	370.011.750,00
8. Peralatan - Rangka	10.543.332.600,00	2.176.335.940,00	0,69	8.365.996.660,00
Jumlah	20.376.598.440,00	3.428.758.440,00	0,69	16.947.840.000,00

Mutasi Aset Peralatan dan Mesin selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	10.947.840.000,00
Penerimaan	
Belanja Modal	2.945.662.500,00
Koreksi e-BMD	483.075.940,00
Jumlah	20.376.598.440,00
Pengurangan	
Evaluasi ke Usable/able	0,00
Mutasi ke lain	0,00
Evaluasi ke Aset Lain-Lain	0,00
Jumlah	0,00
Saldo Akhir	20.376.598.440,00

• Rincian Pemeliharaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Perkiraan
1	Camera Dslr D3 (M5)	1,00	5.700.000,00
2	Filtery Canon 4 Lm	4,00	11.600.000,00
3	AC Split 1 PK 700W Duple	2,00	14.300.000,00
4	Mesa Pening Rempai	1,00	2.300.000,00
5	Kursi Kerja Sdt	1,00	3.600.000,00
6	Myp Kerja	4,00	6.800.000,00
7	Camera Digital Canon EOS 30	1,00	5.000.000,00
8	Slot 1/2 Peralatan Full set PC	1,00	16.500.000,00
9	Teknis PC 15GB (Laminasi IP Duet 1 N3000 (3w) 11,5" x 11,5cm)	1,00	12.900.000,00
10	Laptop (7-12 in) (Ams F10 F30 F2 D- 11700010) 6-800 4g (3,6)	1,00	54.300.000,00
11	AJO D 4700 21 J (Ams A320 D 1215x910x21,5)	5,00	46.500.000,00
12	PC D, 27" Jm4 High (Ams 3000E-LED N2400E (5-1400 8 512)	1,00	10.000.000,00
13	Laptop 14 inch (Ams A1400EA D- 11150410 512 14")	2,00	18.600.000,00
14	Water Basin	30,00	106.722.500,00



15	Bambu RPP Yang Bekas	1.00	40.000.000,00
16	Cermin Tibaang	22.00	270.100.000,00
17	Bambu Laka Lantais Yang Tergagal uk 7,5775 cm	100.00	170.000.000,00
18	Alat Uji Play Struktur	1.00	400.000.000,00
19	Teknik Kabin PND 4-120	1.00	14.150.000,00
20	Warning Light	6.00	182.100.000,00
21	Debetoran	40.00	28.600.000,00
22	APLIKASI 4773 Sempang 4 ABC	1.00	1.070.130.000,00
23	Generator	64.00	120.000.000,00
24	Pelaku Cincring	1.00	213.300.000,00
	Jumlah	354	2.043.662.500,00

- **Kincir Karet E-BMD Perlatan dan Meja (Selok Perlatan dan Meja) (randa (tidak beranak) Ekstrakumulasi ke Intrakumulasi).**

Berdasarkan Berita Acara Nomor 000.2.3.2.262/11A/010/01/2024

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Perkiraan
1	Cermin Tibaang	44.00	220.000.000,00
2	Generator 200kw	207.00	210.000.000,00
3	Bambu Lantais Laka Lantais Yang Tergagal	51.00	49.213.500,00
	Jumlah	302	450.073.500,00

Adapun rincian perlatan meja Dinas Perhubungan Kota Soerabaya per 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

5.2.1.2.21 Alat Meja Rp425.213.733,00

Selaku Alat Meja pada Dinas Perhubungan Kota Soerabaya per 31 Desember 2023 sebesar Rp231.714.713,00 bertambah sebesar Rp213.500,00 diakibatkan penambahan harga model (pelaku cincring) sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp425.213.733,00

Perlatan dan Meja	2024 (Rp)	Berkurang (Rp)	Berkurang (Rp)	2023 (Rp)
Alat Meja	425.213.733,00	213.500,00	0,00	231.713.733,00

5.1.1.2.2.2 Alat Angkutan Rp 2.766.535.408,00

Saldo Alat Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Solatiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.766.535.408,00 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.766.535.408,00.

Perubahan dan Masa	2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	2023 (Rp)
Alat Angkutan	2.766.535.408,00	0,00	0,00	2.766.535.408,00

5.1.1.2.2.3 Alat Bengkel Dan Alat Ukur Rp21.345.000,00

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Dinas Perhubungan Kota Solatiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.345.000,00 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.345.000,00.

Perubahan dan Masa	2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	2023 (Rp)
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	21.345.000,00	0,00	0,00	21.345.000,00

5.1.1.2.2.4 Alat Kantor Dan Rumah Tangga Rp1.276.473.675,00

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Dinas Perhubungan Kota Solatiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.193.623.675,00 bertambah sebesar Rp82.850.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.276.473.675,00.

Perubahan dan Masa	2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	2023 (Rp)
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.276.473.675,00	82.850.000,00	0,00	1.193.623.675,00

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Dinas Perhubungan Kota Solatiga per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	1.193.623.675,00
Penambahan	
Alat Kantor	42.000.000,00
Alat rumah tangga	76.000.000,00
Meja Dan Kursi Kerja Wakil Pejabat	1.000.000,00
Belanja Modal	82.850.000,00
Jumlah	1.276.473.675,00

5.1.1.2.2.5 Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar Rp481.145.500,00

Saldo Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar pada Dinas Perhubungan Kota Solatiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,721.000,00 bertambah sebesar Rp480.424.500,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp481.145.500,00.



Perincian dan Nama	2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Ekstirpasi (Rp)	2023 (Rp)
Alat Studio	481.141.500,00	110.422.100,00	0,00	170.719.400,00
Kemudahan Dan				
Pemetaan				

Saldo Alat Studio, Kemudahan Dan Pemetaan pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	170.719.400,00
Pembelian	
Peralatan Studio Audio	9.500.000,00
Peralatan Studio Pemetaan Peralatan Ukur Tanah	9.700.000,00
Alat-Alat Sederhana	211.222.200,00
Belanja Modal	110.422.100,00
Jumlah	481.141.500,00

5.1.1.2.2.6 Alat Laboratorium **Rp4.195.400.500,00**

Saldo Alat Laboratorium pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.649.900.500,00 bertambah sebesar Rp545.500.000,00 dari belanja modal pemerintah ap. kemudian sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.195.400.500,00

Perincian dan Nama	2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Ekstirpasi (Rp)	2023 (Rp)
Alat Laboratorium	4.195.400.500,00	545.500.000,00	0,00	3.649.900.500,00

Saldo Alat Laboratorium pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	3.649.900.500,00
Pembelian	
Alat Laboratorium Logam, Maris Dan Listrik	410.000.000,00
Peralatan Studio Pemetaan Peralatan Ukur Tanah	135.500.000,00
Belanja Modal	540.000.000,00
Jumlah	4.195.400.500,00

5.1.1.2.2.7 Komputer **Rp664.151.738,00**

Saldo Komputer pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp573.081.738,00 bertambah sebesar Rp91.070.000,00 dari belanja modal pemerintah, sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp664.151.738,00

Perincian dan Nama	2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Ekstirpasi (Rp)	2023 (Rp)
Komputer	664.151.738,00	91.070.000,00	0,00	573.081.738,00

Saldo Komputer pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 adalah



sebagai berikut :

Saldo Awal	270.891.738,00
<i>Penambahan</i>	
Komputer Jaringan	99.470.000,00
Personal Komputer	27.750.000,00
Belanja Modal	94.370.000,00
Jumlah	664.351.738,00

5.1.1.2.2.8 Kasbu -Kasbu **Rp10.543.332.887,00**

Saldo Aset Labormerit pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.363.996.947,00 bertambah sebesar Rp2.179.335.940,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.543.332.887,00.

Perubahan dan Mula	2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	2023 (Rp)
Kasbu - Kasbu	10.543.332.887,00	2.179.335.940,00	0,00	8.363.996.947,00

Saldo Komputer pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	2.363.996.947,00
Penambahan Belanja Modal	
Kasbu Hewan	1.070.350.000,00
Kasbu Tidak Hewan	436.910.000,00
Penambahan Koreksi e-BMID	
Kasbu Tidak Hewan	481.073.940,00
Belanja Modal + Penambahan Koreksi e-BMID	2.179.335.940,00
Jumlah	10.543.332.887,00

5.1.1.2.3 Gedung dan Bangunan **Rp2.137.991.170,00**

Saldo Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.137.991.170,00 naik sebesar 2,20% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.994.308.670,00 dengan rincian sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan	2024 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	2023 (Rp)
1. Bangunan Gedung	2.137.991.170,00	143.682.500,00	0,00	1.994.308.670,00
Jumlah	2.137.991.170,00	143.682.500,00	0,00	1.994.308.670,00

Mulai Aset Gedung dan Bangunan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Saldo Awal	1.994.306,670,00
Pembayaran	
Jumlah	143.682.900,00
Saldo Akhir	2.137.991.170,00

Rincian Pembayaran:

Mutar dari DHS/PW No WA.000.2.1.2.004 tanggal 27 Desember 2024 berupa RekaVitalisasi Atap Gedung Pengajaran K.M

5.1.1.2.4 Aset Tetap Lainnya Rp6.509.500,00

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.509.500,00 naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.509.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

Mutar Aset Tetap Lainnya selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	6.509.500,00
Pembayaran	
Jumlah	0,00
Pengurangan	
Jumlah	0,00
Saldo Akhir	6.509.500,00

5.1.1.2.5 Kontribusi Dalam Pergerakan Rp198.838.000,00

Saldo Kontribusi Dalam Pergerakan pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp198.838.000,00 naik/turun sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp198.838.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Mutar Kontribusi Dalam Pergerakan selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Saldo Awal	198.838.000,00
Pembayaran	
Jumlah	0,00
Pengurangan	
Jumlah	0,00
Saldo Akhir	198.838.000,00

5.1.1.2.6 Akumulasi Penyusutan (Rp17.241.079.867,04)

Saldo Akumulasi Penyusutan pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar (Rp17.241.079.867,04) naik/sebesar (Rp1.244.557.602,11) atau (7,21%) dibandingkan per 31 Desember 2023 (Rp15.996.522.265,23) sebesar dengan rincian sebagai berikut :



Masudai Perencanaan	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Alat Bantu	215.267.652,60	159.242.658,60
2. Alat Angkut	2.538.144.636,56	2.446.213.122,29
3. Alat Bersih dan Alat Lain	21.143.660,00	21.143.660,00
4. Alat Kantor dan Ruang Kerja	1.200.873.474,00	1.170.271.117,00
5. Alat Tulis, Komunikasi dan Pemasaran	224.483.499,00	132.276.800,00
6. Alat Laboratorium	2.646.912.758,00	2.381.675.712,34
7. Komputer	376.292.683,00	342.250.238,00
8. Rangka * Rangka	8.858.379.722,32	8.275.425.146,09
9. Peralengkapan Lainnya	348.176.124,20	987.771.909,00
Jumlah	17.241.479.637,34	15.496.522.251,25

5.2.1.3 DANA CADANGAN Rp0,00

Saldo Dana Cadangan pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.2.1.4 ASET LAINNYA Rp1.391.637.902,96

Saldo Aset Lainnya pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.391.637.902,96 atau sebesar Rp103.313.100,00 atau 11,64% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.574.995.302,96 dengan rincian sebagai berikut :

ASET LAINNYA	Dalam	
	2024	2023
1. Aset Dibayar-Bertahap	0,00	0,00
Total Aset Dibayar-Bertahap	0,00	0,00
2. Aset Tak Berwujud	1.251.294.496,00	1.231.294.496,00
Masudai Amortisasi Aset Tak Berwujud	(779.598.786,00)	(792.821.384,00)
Nilai Buku Aset Tak Berwujud	471.695.710,00	438.473.112,00
3. Aset Lain-Lain	1.131.832.202,96	1.132.612.402,96
Total Aset Lainnya	1.391.637.902,96	1.574.995.302,96

5.2.1.4.1 Kontribusi dengan Pihak Ketiga Rp0,00

Saldo Kontribusi dengan Pihak Ketiga pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sama dengan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

5.1.1.4.3 Aset Tidak Berwujud Rp 1.220.204.496,00

Saldo Aset Tak Berwujud pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.220.204.496,00 dan tidak ada penambahan/pengurangan dari per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.220.204.496,00 merupakan aplikasi atau software atau Gesti yang digunakan untuk aktivitas operasional dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tidak Berwujud	2024 (Rp)	Awal tahun (Rp)	Berkurang (Rp)	2023 (Rp)
1. Software	144.550.206,00	0,00	0,00	144.550.206,00
2. Kajian	975.640.290,00	0,00	0,00	975.640.290,00
Jumlah	1.220.204.496,00	0,00	0,00	1.220.204.496,00

5.1.1.4.4 Aset Lain-lain Rp1.151.612.202,96

Saldo Aset Lain-lain pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.151.612.202,96 merupakan aset riil baik berwujud dengan rincian sebagai berikut:

Aset lain-lain	2024 (Rp)	Berambah (Rp)	Berkurang (Rp)	2023 (Rp)
Aset Lain-lain	1.151.612.202,96		1.160.200,00	1.152.612.402,96

Saldo Kompart pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	1.152.612.402,96
Pengurangan	
Penghapusan	1.000.200,00
Pengurangan	1.000.200,00
Jumlah	1.151.612.202,96

Rincian Penghapusan Barang di Aset Lain - Lain SK Penghapusan Aset 003.2.4-49/001.2024 tanggal 6 Mei 2024:

No	Klasifikasi Objek Barang	Jumlah Barang	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Mesin Ketik Pictnik	1,00	2.200.022,00	2.200.022,00	-
2	Mesin Ketik Pictnik	1,00	2.200.022,00	2.200.022,00	-
3	Lemari besi (rak)	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
4	alat lemari besi (Lemari LCD proyektor)	1,00	642.000,00	642.000,00	-
5	alat lemari besi (LCD proyektor)	1,00	7.200.000,00	7.200.000,00	-
6	alat lemari besi (LCD proyektor)	1,00	8.776.100,00	8.776.100,00	-
7	alat lemari besi (Fotokopi)	1,00	1.717.100,00	1.717.100,00	-
8	Lemari Kayu	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
9	Rak kayu	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
10	Kursi besi metal	1,00	2.200.500,00	2.200.500,00	-



11	Kerusi Kayu Staf	1,00	303.000,00	303.000,00	-
12	Kerusi Kayu Staf	1,00	317.915,00	317.915,00	-
13	Kerusi Kayu Staf	1,00	317.915,00	317.915,00	-
14	Kerusi Kayu Staf	1,00	317.915,00	317.915,00	-
15	Kerusi Kayu Staf	1,00	317.915,00	317.915,00	-
16	Kerusi Kayu Staf	1,00	317.915,00	317.915,00	-
17	Kerusi Kayu Staf	1,00	317.915,00	317.915,00	-
18	Kerusi Kayu Staf	1,00	317.915,00	317.915,00	-
19	Kerusi Kayu Staf	1,00	317.915,00	317.915,00	-
20	Kerusi Kayu Staf	1,00	317.915,00	317.915,00	-
21	Kerusi Kayu Staf	1,00	317.915,00	317.915,00	-
22	Kerusi Kayu Staf	1,00	317.915,00	317.915,00	-
23	Kerusi Kayu Staf	1,00	317.915,00	317.915,00	-
24	Kerusi Kayu Staf	1,00	317.915,00	317.915,00	-
25	Kerusi Kayu Staf	1,00	374.000,00	374.000,00	-
26	Kerusi Kayu Staf	1,00	374.000,00	374.000,00	-
27	Kerusi Kayu Staf	1,00	374.000,00	374.000,00	-
28	Kerusi Kayu Staf	1,00	374.000,00	374.000,00	-
29	Kerusi Kayu Staf	1,00	374.000,00	374.000,00	-
30	Kerusi Kayu Staf	1,00	374.000,00	374.000,00	-
31	Kerusi Kayu Staf	1,00	374.000,00	374.000,00	-
32	Kerusi Kayu Staf	1,00	374.000,00	374.000,00	-
33	Perangkat Kerja Tetap	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
34	Perangkat Kerja Tetap	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
35	Perangkat Kerja	1,00	1.894.025,00	1.894.025,00	-
36	Kerusi Plastik	1,00	406.236,00	406.236,00	-
37	Kerusi Plastik	1,00	383.313,00	383.313,00	-
38	Kerusi Plastik	1,00	383.313,00	383.313,00	-
39	Kerusi Plastik	1,00	383.334,00	383.334,00	-
40	Kerusi Plastik	49,00	12.214.000,00	12.214.000,00	-
41	Meja Komputer	1,00	1.171.500,00	1.171.500,00	-
42	Meja Komputer	1,00	1.171.500,00	1.171.500,00	-
43	Kerusi Kayu Pj. Es II	1,00	800.000,00	800.000,00	-
44	Kerusi Kayu Fuchin II	1,00	1.718.000,00	1.718.000,00	-
45	Kerusi Kayu Fuchin III	1,00	724.000,00	724.000,00	-
46	Kerusi Kayu Pj. Es II	1,00	2.027.263,00	2.027.263,00	-
47	Kerusi Kayu Fuchin IV	1,00	90.647,00	90.647,00	-
48	Kerusi Kayu Fuchin IV	1,00	90.647,00	90.647,00	-
49	Kerusi Kayu Fuchin IV	1,00	90.647,00	90.647,00	-
50	Kerusi Kayu Fuchin IV	1,00	90.647,00	90.647,00	-
51	Kerusi Kayu Fuchin IV	1,00	90.647,00	90.647,00	-
52	Kerusi Kayu Fuchin IV	1,00	90.647,00	90.647,00	-
53	Kerusi Kayu Fuchin IV	1,00	900.000,00	900.000,00	200.200,00
54	Kamasa Digital	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
55	Kamasa Digital II.B	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
56	Handy Talky (HT)	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
57	Handy Talky (HT)	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
58	Handy Talky (HT)	1,00	507.857,00	507.857,00	-
59	Handy Talky (HT)	1,00	507.857,00	507.857,00	-
60	Handy Talky (HT)	1,00	507.857,00	507.857,00	-
61	Handy Talky (HT)	1,00	507.857,00	507.857,00	-
62	Handy Talky (HT)	1,00	718.578,00	718.578,00	-



63	Hourly Tally (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
64	Hourly Tally (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
65	Hourly Tally (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
66	Hourly Tally (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
67	Hourly Tally (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
68	Hourly Tally (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
69	Hourly Tally (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
70	Hourly Tally (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
71	Hourly Tally (HT)	1,00	900.000,00	900.000,00	-
72	Hourly Tally (HT)	1,00	900.000,00	900.000,00	-
73	Hourly Tally (HT)	1,00	900.000,00	900.000,00	-
74	Hourly Tally (HT)	1,00	900.000,00	900.000,00	-
75	Hourly Tally (HT)	1,00	900.000,00	900.000,00	-
76	Hourly Tally (HT)	1,00	900.000,00	900.000,00	-
77	Hourly Tally (HT)	1,00	900.000,00	900.000,00	-
78	Hourly Tally (HT)	1,00	900.000,00	900.000,00	-
79	Hourly Tally (HT)	1,00	900.000,00	900.000,00	-
80	Hourly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
81	Hourly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
82	Hourly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
83	Hourly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
84	Hourly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
85	Hourly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
86	Hourly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
87	Hourly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
88	Hourly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
89	PC unit + scanner LFD	1,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-
90	PC unit + scanner LFD	1,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-
91	PC unit + scanner LFD	1,00	7.487.500,00	7.487.500,00	-
92	Laptop	1,00	4.738.000,00	4.738.000,00	-
93	Laptop	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
94	Laptop	1,00	9.325.000,00	9.325.000,00	-
95	Laptop	1,00	12.015.000,00	12.015.000,00	-
96	NETBOOK	1,00	3.038.000,00	3.038.000,00	-
97	UPS	1,00	838.000,00	838.000,00	-
98	UPS	1,00	738.000,00	738.000,00	-
99	UPS	1,00	738.000,00	738.000,00	-
100	UPS	1,00	738.000,00	738.000,00	-
101	UPS	1,00	938.000,00	938.000,00	-
102	UPS	1,00	938.000,00	938.000,00	-
103	UPS	1,00	938.000,00	938.000,00	-
104	UPS	1,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
105	UPS	1,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
106	UPS	1,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
107	UPS	1,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
108	UPS	1,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
109	UPS	1,00	438.000,00	438.000,00	-
110	UPS	1,00	1.233.650,00	1.233.650,00	-
111	UPS	1,00	1.233.650,00	1.233.650,00	-
112	UPS	1,00	172.500,00	172.500,00	47.500,00
113	UPS	1,00	172.500,00	172.500,00	47.500,00
114	UPS	1,00	735.000,00	735.000,00	245.000,00



111	IPK	1,00	1.407.000,00	1.407.000,00	-
116	Prater	1,00	1.445.000,00	1.445.000,00	-
117	Prater Multifungsi	1,00	1.096.000,00	1.096.000,00	-
118	Prater Multifungsi	1,00	1.096.000,00	1.096.000,00	-
119	Prater Multifungsi	1,00	1.510.000,00	1.510.000,00	-
120	Prater Multifungsi	1,00	2.000.500,00	2.000.500,00	-
121	Prater	1,00	1.910.000,00	1.910.000,00	-
122	Prater	1,00	7.740.000,00	7.740.000,00	-
123	Prater Multifungsi	1,00	2.014.400,00	2.014.400,00	-
124	Prater dan servis	1,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00
125	Prater dan servis	1,00	8.823.000,00	8.823.000,00	-
126	Prater Multifungsi	1,00	1.271.600,00	1.271.600,00	-
127	Prater Multifungsi	1,00	1.510.000,00	1.510.000,00	-
128	Ak; Land Terakumulasi	1,00	2.200.022,00	1.140.000.000,00	-
129	Stationery printing	1,00	2.200.022,00	60.710.771,00	-
	JUMLAH	172,00	5.580.200,00		1.425.047.121,00

5.1.1.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Rp979.590.790,00)

Pemerintah Kota Salatiga menarapkan amortisasi aset tak berwujud dengan menggunakan metode garis lurus. Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar (Rp797.821.380,00) naik sebesar Rp201.990.150,00 atau 40,09% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

Amortisasi Aset Tak Berwujud	2024	2023
Soliman	(227.090.470,00)	(209.421.300,00)
Ejalon	(751.600.300,00)	(100.390.000,00)
Jumlah	(978.690.770,00)	(709.811.300,00)

5.1.2 KEWAJIBAN Rp41.897.150,33

5.1.2.2 Kewajiban Jangka Pendek Rp41.897.150,33

Kewajiban jangka pendek pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.897.150,33 (naik sebesar Rp33.530.000,00) dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.440.017,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kewajiban jangka pendek	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Piutang di terima di muka	37.271.335,33	111.410.730,00
2. Utang jangka	4.625.815,00	4.027.287,00
Jumlah	41.897.150,33	115.438.017,00

5.1.2.3 Pendapatan di terima di muka Rp37.271.335,33

Pendapatan di terima di muka pada Dinas Perbukuan Kota Salatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.271.335,33 dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp111.410.730,00

dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan di antara di antara	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Pendapatan di antara di antara	37.275.333,33	311.436.738,00
Jumlah	37.275.333,33	311.436.738,00

5.2.2.4 Utang belanja Rp4.625.823,00

Utang belanja pada Dinas Perbukuan Kota Solatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.625.823,00 dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.657.267,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kecayaan jangka pendek	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1. Utang belanja	Rp4.625.823,00	4.657.267,00
Jumlah	Rp4.625.823,00	4.657.267,00

5.2.3 EKUITAS Rp8.847.200.315,31

Ekuitas pada Dinas Perbukuan Kota Solatiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.847.200.315,31 naik sebesar Rp2.173.114.815,00 atau 32,90% dibandingkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.674.085.500,26 dengan rincian sebagai berikut :

Hutang	2024	2023
Dinas Perbukuan Kota Solatiga	8.847.200.315,31	6.674.085.500,26
Jumlah	8.847.200.315,31	6.674.085.500,26

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan Laporan Operasional Dinas Perbukuan Kota Solatiga pada tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

5.3.1 Kegiatan Operasional (Rp7.129.044.199,95)

Kegiatan Operasional pada Dinas Perbukuan Kota Solatiga senilai (Rp7.129.044.199,95) adalah rinciannya terdiri dari:

No	Kegiatan Operasional	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1.	Pendapatan	2.251.698.616,57	1.614.628.916,67
2.	Beban	9.421.644.767,43	16.075.961.489,83
	Selisih (defisit) dari operasi	(7.129.044.199,95)	(9.359.236.375,16)

5.3.1.1 Pendapatan **Rp1.292.600.916,67**

Pendapatan pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga senilai Rp1.292.600.916,67 pendapatan tersebut terdiri dari:

No	Kategori Operasional	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023
1.	Pendapatan Kontribusi Daerah	2.278.773.406,67	1.614.620.916,67
2.	Lain-lain PAD yang Sah	13.827.200,00	0,00
	Jumlah PAD	2.292.600.606,67	1.614.620.916,67

5.3.1.1.1 Pendapatan Kontribusi Daerah **Rp2.278.773.406,67**

Pendapatan Kontribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga tahun 2024 senilai Rp2.278.773.406,67 terdiri dari:

No	Jenis PAD Akrual	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1.	Pendapatan LO 2024 terdiri dari	2.278.773.406,67	1.614.620.916,67
a.	Kontribusi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Tempat Tidak Umum	2.186.208.000,00	1.262.815.000,00
b.	Kontribusi Pengawasan Kemandirian Berwisata	44.760.504,00	254.207.916,67
c.	Kontribusi Pelayanan Pemertakan Tempat Publik untuk Kemandirian Pemasangan dan Non Umum	0,00	40.340.000,00
d.	Kontribusi Pelayanan Penyelenggaraan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	0,00	36.180.000,00
e.	Kontribusi Pelayanan Tempat Kemandirian Publik	18.716.000,00	9.172.000,00
f.	Kontribusi lain yang sah untuk Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum	20.489.002,67	20.796.000,00
2.	Perubahan LO (Peningk LRA)		
a.	Pendapatan Cash Basis 2023 Register 515	2.218.441.200,00	1.817.994.000,00
b.	Pendapatan 20,30,31 Des.2023 yang jatuh 2 Januari 2024	(2.765.600,00)	(2.657.000,00)
c.	Peningk Kontribusi Publik 2023	0,00	0,00
d.	Pendapatan H. Des 2024 yang dicatat 2 Januari 2023	0,00	2.765.000,00
e.	Pendapatan di tahun di awal 2023	111.409.700,00	111.814.000,67
f.	Pendapatan akronis di awal 2024	(17.211.333,33)	(111.470.700,00)
	Jumlah Pendapatan Kontribusi Daerah Akrual	2.278.773.406,67	1.614.620.916,67

5.3.1.1.2 Lain-lain PAD yang Sah **Rp13.827.200,00**

Nilai Pendapatan Sah Daerah Lainnya pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga tahun 2024 sejumlah Rp13.827.200,00 berupa hasil sewa kamar mandi di Terminal Yamanan Kota Salatiga.

No	Lain-lain PAD yang Sah	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023
1.	Lain-lain PAD yang Sah	13.827.200,00	0,00
	Jumlah PAD	13.827.200,00	0,00

5.3.1.2 Bebas **Rp8.421.644.767,61**

Jumlah Bebas Laporan Operasional pada Dinas Perbukudan Kota Solatiga tahun 2024 senilai Rp8.421.644.767,61 terdiri dari:

No	Jenis Bebas Tahun	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1.	Bebas Pegawai	4.794.478.218,00	4.324.084.799,00
2.	Bebas Barang	431.579.259,65	3.424.024.220,94
3.	Bebas Jasa	1.503.166.161,33	1.278.017.318,33
4.	Bebas Pemeliharaan	996.931.186,00	546.141.030,00
5.	Bebas Penghasilan Direct	294.444.000,00	218.388.836,00
6.	Bebas Penyusutan dan Amortisasi	1.426.114.082,11	1.134.514.330,34
	Jumlah	9.421.644.767,61	10.971.981.489,31

5.3.1.2.1 Bebas Pegawai **Rp4.394.478.218,00**

Jumlah Bebas Pegawai pada Dinas Perbukudan Kota Solatiga tahun 2024 senilai Rp4.394.478.218,00 adapun nilai tersebut terdiri dari:

No	Jenis Bebas Pegawai Tahun	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
	Bebas Pegawai		
1.	Gaji dan Tunjangan ASN	2.398.145.213,00	2.251.940.947,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	1.026.411.013,00	1.081.034.312,00
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan Objektif Layanan ASN	312.445.261,00	107.054.170,00
4.	Batas Gaji dan Tunjangan KIDM NAKDIB	7.477.000,00	4.441.000,00
	Jumlah	4.394.478.218,00	4.324.086.729,00

5.3.1.2.2 Bebas Perediaan **Rp830.879.259,95**

Jumlah Bebas Perediaan pada Dinas Perbukudan Kota Solatiga tahun 2024 senilai Rp830.879.259,95 adapun nilai tersebut terdiri dari:

a. Bebas Barang Pakai Habis **Rp830.879.259,95**

No	Jenis Bebas Tahun	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1.	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	181.898.512,00	128.545.181,00
2.	Beban Bahan-Beli Tabung Gas	1.289.000,00	1.899.000,00
3.	Beban Bahan-Bahan Listrik	6.232.019,00	10.137.000,00
4.	Beban Suku Cadang Suku Cadang Alat angkutan	10.148.258,00	11.515.000,00
5.	Beban Suku Cadang Suku Cadang Listrik	0,00	12.224.100,00
6.	Beban Perediaan Alat Tulis Kantor	13.520.000,00	11.440.000,00
7.	Beban Perediaan alat tulis dan elektronik	7.911.000,00	6.194.000,00
8.	Beban perediaan printer, scanner, kamera, kamera	3.318.000,00	1.133.000,00
9.	Beban Bahan-Bahan bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00

10.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan umum	226.981.627,00	338.841.832,00
11.	Beban alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya	8.898.669,00	13.595.189,00
12.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kantor dan Pusat	18.871.089,00	17.231.889,00
13.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	16.377.489,00	11.868.189,00
14.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pusat Kantor	0,00	412.289,00
15.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Partisipatif Dinas	74.733.089,00	274.389,14
16.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Asisten Centralkan	1.929.889,00	388.743.889,00
17.	Beban Bahan dan Pakan Bahan dan Pakan Lainnya	110.348.124,00	583.889,00
18.	Beban Bahan dan Pakan Sempoa	338.889,00	507.433.823,00
19.	Beban Barang untuk Depdiknas/Disdik Depdik Masyarakat	176.788.889,00	128.700.889,00
20.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Partisipatif Perbaikan Organisasi	4.388.889,00	1.071.489.731,00
	Jumlah	818.876.289,00	3.416.816.126,04

5.3.1.3.3. Beban Jasa Rp1.588.386.561,55

Jumlah Beban Jasa pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga tahun 2024 adalah Rp1.588.386.561,55
adapun rinciannya terdapat dalam tabel berikut :

No	Beban Jasa Tahun	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
4	Beban Jasa Kantor	1.871.677.462,00	1.112.876.488,00
1	Beban Jasa Tenaga Administrasi, Kelembagaan Umum, dan Partisipatif Masyarakat	0,00	0,00
2	Beban Jasa Tenaga Administrasi	623.623.246,00	382.947.446,00
3	Beban Jasa Tenaga Kelembagaan	56.678.024,00	54.587.274,00
4	Beban Jasa Tenaga Kelembagaan	37.387.314,00	47.674.818,00
5	Beban Jasa Penunjang (Instansi Terpadu, As, dan Lain-lain)	0,00	0,00
6	Beban Jasa Kelembagaan	0.000.000,00	0.000.000,00
7	Beban Tagihan Telekomunikasi	1.318.623,00	723.733,00
8	Beban Tagihan Asuransi	3.581.889,00	0.781.889,00
9	Beban Tagihan Listrik	47.139.381,00	42.323.641,00
10	Beban Langganan Jarak Jauh Kantor/ Majelis Kantor Perwakilan Desa	1.678.588,00	1.868.889,00
		0,00	79.210.889,00



11. Belanja Pembelian Pajak, Ret. dan Permisian	12.514.000,00	12.514.000,00
12. Belanja Listrik	283.360.000,00	273.131.000,00
13. Belanja Hibah/sumbu Nonretribusi/Perbubis, Mekanisme, Penyaluran, Aset dan Pasifita	32.000.000,00	18.200.000,00
14. Belanja jasa per. pembelian perbubis/layanan	450.000,00	0,00
B. Belanja Jasa Jasaan/Asuransi	27.801.700,00	40.712.918,00
15. Belanja jasa asuransi Kesehatan bagi Non ASN	23.978.018,00	23.024.718,00
16. Belanja jasa asuransi Kesehatan Kerja bagi Non ASN	1.403.771,36	1.378.474,00
17. Belanja jasa Kesehatan bagi Non ASN	1.793.454,44	1.723.099,00
18. Belanja Asuransi (barang milik daerah)	99.594.657,55	14.350.661,36
C. Belanja Sewa Perakunan dan Mesin	81.000.000,00	91.476.000,00
Belanja Sewa Kebutuhan Penunjang	81.000.000,00	89.000.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	22.176.000,00
D. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.000.000,00	0,00
Belanja Sewa Aset Tetap	7.000.000,00	0,00
E. Belanja Sewa Aset Tak Berwujud	78.383.200,00	0,00
Belanja dan Konsumsi Penguasaan Belanja jasa dan Penguasaan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sp4 Transportasi	78.383.200,00	0,00
F. Belanja Jasa Konsumsi Konstruksi	154.183.340,00	92.489.000,00
17. Belanja dan Konsumsi Penguasaan Belanja jasa dan Penguasaan Pekerjaan Konstruksi Teknik Sp4 Transportasi	254.183.340,00	92.489.000,00
JUMLAH	1.589.386.501,00	1.278.957.318,00

5.3.1.2.4 Belanja Pemeliharaan.....Rp906.901.104,00

Merupakan Belanja Pemeliharaan pada Dinas Perbukuan kota Salatiga tahun 2024 senilai Rp906.901.104,00 dengan nilai tersebut terdiri dari :

No	Jenis Belanja	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1.	Belanja pemeliharaan jalan, jembatan dan jembatan	0,00	0,00
2.	Belanja Pemeliharaan Perakunan dan Mesin	799.679.200,00	441.504.800,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu-Alat Bantu-Fiturak (termasuk alat)	3.040.000,00	3.200.000,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Bantu-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0,00	0,00
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penunjang	20.375.478,00	14.120.000,00

Beban Perbaikan Alat Bantu Alat Tulis Alat Tulis - Alat Perbaikan Kabinet Berantai	38.517.000,00	38.517.000,00
Beban Perbaikan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga lainnya (Hewan Gizi)	1.250.000,00	11.136.000,00
Beban Perbaikan Alat Audio, Komunikasi, dan Penerangan-Peralatan Penerangan-Peralatan Antara VIDEOM	0,00	12.000.000,00
Beban Perbaikan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Perbaikan	0,00	0,00
Beban Perbaikan Komputer-Komputer dan Personal Computer	11.070.000,00	10.940.000,00
Beban Perbaikan Rangka-Rangka-Rangka-Rangka Lain-Lain Dan Rangka-Rangka Lain-Lain Dan Lainnya	400.000.000,00	0,00
Beban Perbaikan Rangka-Rangka-Rangka-Rangka Lain-Lain Dan Rangka-Rangka Lain-Lain Dan Lainnya	224.041.400,00	170.324.000,00
Beban perbaikan computer - pembelian computer - perbaikan jaringan	25.161.500,00	0,00
3. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	175.291.274,00	44.599.800,00
Beban Perbaikan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	175.051.274,00	44.599.800,00
4. Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	30.020.000,00
Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	30.020.000,00
JUMLAH	906.031.104,00	346.341.800,00

5.3.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas.....Rp293.654.620,00

adalah Beban Perjalanan Dinas pada Dinas Perbukuan Kota Salitiga tahun 2023 senilai Rp293.654.620,00

No	Jenis Beban Perjalanan Dinas	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1.	Beban Perjalanan Dinas Bus	235.671.420,00	114.979.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.680.000,00	31.330.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	42.361.200,00	151.969.000,00
	JUMLAH	293.654.620,00	358.388.000,00

5.3.1.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....Rp1.426.336.902,11

adalah Beban Penyusutan pada Dinas Perbukuan Kota Salitiga tahun 2024 senilai

Rp1.426.329.002,11 adapun nilai tersebut terdiri dari :

No	Bahan Penyusunan	Jumlah 2014 (Rp)	Jumlah 2013 (Rp)
1	Bahan Penyusunan Alat Pemadam-Elctric, Constaning Set	21.480.557,34	21.480.557,34
2	Bahan Penyusunan Alat Pemadam-Pranga	690.000,00	690.000,00
3	Bahan Penyusunan Alat Pemadam-Alat Pemadam Lainnya	34.933.337,30	4.433.337,30
4	Bahan Penyusunan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Darat Bermotor Persewaan	0,00	0,00
5	Bahan Penyusunan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Persewaan	72.087.142,84	72.087.142,84
6	Bahan Penyusunan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Umum	0,00	26.670.000,00
7	Bahan Penyusunan Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Sewa/Dan	26.090.271,41	31.080.420,30
8	Bahan Penyusunan Alat Peralatan Tak Bermotor- Peralatan Usaha (Handtool Tools)	0,00	0,00
9	Bahan Penyusunan Alat Ular-Alat Ular-Perdagangan	0,00	1.875.000,00
10	Bahan Penyusunan Alat Karan-Alat Persewaan Perdagangan Karan	25.335.000,00	27.826.700,00
11	Bahan Penyusunan Alat Karan-Alat Karan Lainnya	36.290.832,00	7.710.832,00
12	Bahan Penyusunan Alat Karan-Tangga-Mobil	10.080.610,00	10.881.420,00
13	Bahan Penyusunan Alat Karan-Tangga-Alat Perdagangan	2.400.000,00	2.400.000,00
14	Bahan Penyusunan Alat Karan-Tangga-Alat Perdagangan	2.960.000,00	4.740.000,00
15	Bahan Penyusunan Alat Karan-Tangga-Alat Dana	380.000,00	380.000,00
16	Bahan Penyusunan Alat Karan-Tangga-Alat Karan Tangga Lainnya (Giant Ust)	2.390.000,00	29.223.400,00
17	Bahan Penyusunan Mula dan Karu Karu Rupa Pajabat-Mula Karu Rupa Pajabat	610.000,00	1.822.700,00
18	Bahan Penyusunan Mula dan Karu Karu Rupa Pajabat-Karu Karu Pajabat	0,00	1.081.000,00
19	Bahan Penyusunan Alat Studio-Produksi Studio- Audio	1.000.000,00	0,00
20	Bahan Penyusunan Alat Studio-Produksi Studio- Video dan Film	5.121.000,00	5.121.000,00
21	Bahan Penyusunan Alat Studio-Produksi Cetak	5.340.000,00	1.340.000,00

22	Belanja Penyusutan Alat Studio Produksi Studio Perencanaan/Produksi Ular Tanah	1.940.000,00	0,00
23	Belanja Penyusutan Alat Studio Alat Studio Lainnya	0,00	0,00
24	Belanja Penyusutan Alat Komunikasi Alat Komunikasi Telepon	10.642.100,00	10.642.100,00
25	Belanja Penyusutan Alat Komunikasi Alat Alat Sirene	10.244.300,00	0,00
27	Belanja Penyusutan Alat Komunikasi Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	4.000.000,00	4.000.000,00
28	Belanja Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geomat, Mekanik, dan Listrik	237.321.312,00	183.271.312,00
29	Belanja Penyusutan Alat Laboratorium Lapangan Bidang Alat Laboratorium Kadaster Udara	27.795.714,29	0,00
30	Belanja Penyusutan Komputer Unit Komputer Jaringan	16.690.000,00	0,00
31	Belanja Penyusutan Komputer Unit Personal Computer	10.643.710,00	21.093.942,00
32	Belanja Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Multimedia	6.750.000,00	17.073.525,00
34	Belanja Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	300.000,00
35	Belanja Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	1.114.575,00
36	Belanja Penyusutan Rangka Rangka Lada Lada Datar Rangka Besi	243.762.100,00	244.777.000,00
37	Belanja Penyusutan Rangka Rangka Lada Lada Datar Rangka Tahan Besi	141.302.075,54	14.770.000,00
38	Belanja Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	37.011.100,40	36.201.000,40
39	Belanja Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal Pelabuhan/Bandara	1.394.222,00	1.394.222,00
40	Belanja Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	10.360.050,00	10.360.050,00
41	Belanja Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Regasi	107.205.100,00	147.401.100,00
	JUMLAH	1.436.107.000,21	1.139.354.000,20

5.3.2 Kegiatan Non Operasional Rp483.075.940,00

Jumlah Kegiatan Non Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Satya Wana tahun 2024 adalah Rp483.075.940,00.

5.3.2.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional..... Rp483.075.948,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga tahun 2024 senilai Rp483.075.948,00 diperoleh dari rekening a/RMD Asas Peralatan Mekanik (Rambu Yaloh Homografi) terakumulasi ke induknya, nomor 000.1.1.2.20.1A/a/RMD/2024 tanggal 1 November 2024.

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Perolehan
1	Curva Tolangan	44,00	228.900.000,00
2	Gambar 207m	207,00	210.000.000,00
3	Rambu Lampa Lalu Lintas Yang Terang	51,00	49.175.000,00
	Jumlah	302	483.075.000,00

5.3.3 Surplus / Defisit LO..... (Rp6.645.968.210,94)

Jumlah Surplus / Defisit LO pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga tahun 2024 adalah senilai Rp6.645.968.210,94

No	Kegiatan Operasional	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1.	Partisipasi Akti Dasar	2.270.698.818,67	1.814.620.318,67
2.	Beban	9.421.844.767,61	10.973.991.480,83
3.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	483.075.948,00	1.688.716.929,00
	Surplus/Defisit dari operasi	(6.645.968.210,94)	(9.817.997.582,76)

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas memberikan gambaran tentang perubahan ekuitas awal tahun 2024 sampai dengan akhir tahun pada 31 Desember 2024 yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Salatiga dengan rincian sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal.....Rp6.674.065.680,26

Ekuitas awal merupakan kekayaan bersih yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Salatiga pada 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp 6.674.065.680,26

No	Uraian	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1.	Ekuitas Awal	6.674.065.680,26	6.165.281.593,02

5.4.2 Surplus/Defisit-LO.....Rp(6.645.968.210,94)

Jumlah Surplus / Defisit LO pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga tahun 2024 adalah senilai Rp6.645.968.210,94

No	Kegiatan Operasional	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1.	Partisipasi Akti Dasar	2.270.698.818,67	1.814.620.318,67
2.	Beban	9.421.844.767,61	10.973.991.480,83

3	Kepala Diklat (tan. Kegiatan Non Operasional)	483.071.940,00	483.071.940,00
	Kepala diklat dan kegiatan	19.443.963.210,44	19.327.901.342,56

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Mendasar..... Rp(2.580.200,00)

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/basisdata mendasar pada Lembar pada Urus Perhubungan Tahun 2024 adalah sebesar Rp(2.580.200,00)

No	Uraian	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1.	Kerinci Nihil Perbaikan	0,00	0,00
2.	Kerinci Nihil Perbaikan	0,00	11.043.000,00
3.	Lain-lain	1.580.200,00	120.000.000,00
	JUMLAH	1.580.200,00	131.043.000,00

• Rincian Kerinci Lain – Lain

Perubahan Anggaran Lain = Lain sesuai dengan SK Penghapusan Anggaran 189.2.4/01/2024 tanggal 6 Mei 2024

No	Rincian Objek Barang	Jumlah Barang	Harga Pokok	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Meja Kayu Plastik	1,00	2.200.022,00	2.200.022,00	-
2	Meja Kayu Plastik	1,00	2.200.022,00	2.200.022,00	-
3	Lemari besi/wood	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
4	alat kantor lainnya (Layar LCD proyektor)	1,00	842.300,00	842.300,00	-
5	alat kantor lainnya (LCD proyektor)	1,00	7.000.000,00	7.000.000,00	-
6	alat kantor lainnya (LCD proyektor)	1,00	8.776.100,00	8.776.100,00	-
7	alat kantor lainnya (Faksimili)	1,00	1.327.100,00	1.327.100,00	-
8	Lemari Kayu	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
9	Rak kayu	1,00	3.200.000,00	3.200.000,00	-
10	Kursi besi/metal	1,00	2.700.330,00	2.700.330,00	-
11	Kursi Kayu 5sd	1,00	303.000,00	303.000,00	-
12	Kursi Kayu 5sd	1,00	317.015,00	317.015,00	-
13	Kursi Kayu 5sd	1,00	317.015,00	317.015,00	-
14	Kursi Kayu 5sd	1,00	317.015,00	317.015,00	-
15	Kursi Kayu 5sd	1,00	317.015,00	317.015,00	-
16	Kursi Kayu 5sd	1,00	317.015,00	317.015,00	-
17	Kursi Kayu 5sd	1,00	317.015,00	317.015,00	-
18	Kursi Kayu 5sd	1,00	317.015,00	317.015,00	-
19	Kursi Kayu 5sd	1,00	317.015,00	317.015,00	-
20	Kursi Kayu 5sd	1,00	317.015,00	317.015,00	-
21	Kursi Kayu 5sd	1,00	317.015,00	317.015,00	-
22	Kursi Kayu 5sd	1,00	317.015,00	317.015,00	-
23	Kursi Kayu 5sd	1,00	317.015,00	317.015,00	-
24	Kursi Kayu 5sd	1,00	317.015,00	317.015,00	-
25	Kursi Kayu 5sd	1,00	374.000,00	374.000,00	-
26	Kursi Kayu 5sd	1,00	374.000,00	374.000,00	-
27	Kursi Kayu 5sd	1,00	374.000,00	374.000,00	-



28	Kerus Kayu Staf	1,00	174.000,00	174.000,00	-
29	Kerus Kayu Staf	1,00	174.000,00	174.000,00	-
30	Kerus Kayu Staf	1,00	174.000,00	174.000,00	-
31	Kerus Kayu Staf	1,00	174.000,00	174.000,00	-
32	Kerus Kayu Staf	1,00	174.000,00	174.000,00	-
33	Zincraja baru semua	1,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-
34	Zincraja baru semua	1,00	2.300.000,00	2.300.000,00	-
35	Kursi kayu	1,00	1.094.925,00	1.094.925,00	-
36	Kursi Spat	1,00	406.250,00	406.250,00	-
37	Kursi Spat	1,00	383.375,00	383.375,00	-
38	Kursi Spat	1,00	383.375,00	383.375,00	-
39	Kursi Spat	1,00	383.374,00	383.374,00	-
40	Kursi Spat	49,00	12.214.000,00	12.214.000,00	-
41	Meja Komputer	1,00	1.171.500,00	1.171.500,00	-
42	Meja Komputer	1,00	1.171.500,00	1.171.500,00	-
43	Kerus Kayu Pk Pk II	1,00	800.000,00	800.000,00	-
44	Kerus Kayu Eselon II	1,00	1.719.000,00	1.719.000,00	-
45	Kerus Kayu Eselon III	1,00	724.004,00	724.004,00	-
46	Kerus Kayu Pk Pk II	1,00	2.827.205,00	2.827.205,00	-
47	Kerus Kayu Eselon IV	1,00	30.647,00	30.647,00	-
48	Kerus Kayu Eselon IV	1,00	30.647,00	30.647,00	-
49	Kerus Kayu Eselon IV	1,00	30.647,00	30.647,00	-
50	Kerus Kayu Eselon IV	1,00	30.647,00	30.647,00	-
51	Kerus Kayu Eselon IV	1,00	30.647,00	30.647,00	-
52	Kerus Kayu Eselon IV	1,00	30.647,00	30.647,00	-
53	Kerus Kayu Eselon IV	1,00	800.000,00	800.000,00	300.200,00
54	Camara Digital	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
55	Camara Digital SLR	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
56	Headset Talky (HT)	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
57	Headset Talky (HT)	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
58	Headset Talky (HT)	1,00	507.827,00	507.827,00	-
59	Headset Talky (HT)	1,00	507.827,00	507.827,00	-
60	Headset Talky (HT)	1,00	507.827,00	507.827,00	-
61	Headset Talky (HT)	1,00	507.827,00	507.827,00	-
62	Headset Talky (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
63	Headset Talky (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
64	Headset Talky (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
65	Headset Talky (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
66	Headset Talky (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
67	Headset Talky (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
68	Headset Talky (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
69	Headset Talky (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
70	Headset Talky (HT)	1,00	728.578,00	728.578,00	-
71	Headset Talky (HT)	1,00	800.000,00	800.000,00	-
72	Headset Talky (HT)	1,00	800.000,00	800.000,00	-
73	Headset Talky (HT)	1,00	800.000,00	800.000,00	-
74	Headset Talky (HT)	1,00	800.000,00	800.000,00	-
75	Headset Talky (HT)	1,00	800.000,00	800.000,00	-
76	Headset Talky (HT)	1,00	800.000,00	800.000,00	-
77	Headset Talky (HT)	1,00	800.000,00	800.000,00	-
78	Headset Talky (HT)	1,00	800.000,00	800.000,00	-
79	Headset Talky (HT)	1,00	800.000,00	800.000,00	-



88	Headly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
89	Headly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
90	Headly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
91	Headly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
92	Headly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
93	Headly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
94	Headly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
95	Headly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
96	Headly Tally (HT)	1,00	913.000,00	913.000,00	-
97	PC case + monitor LED	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	-
98	PC case + monitor LED	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
99	PC case + monitor LED	1,00	7.407.500,00	7.407.500,00	-
100	Laptop	1,00	4.130.000,00	4.130.000,00	-
101	Laptop	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-
102	Laptop	1,00	9.929.000,00	9.929.000,00	-
103	Laptop	1,00	12.813.000,00	12.813.000,00	-
104	NETBOOK	1,00	3.830.000,00	3.830.000,00	-
105	UPS	1,00	830.000,00	830.000,00	-
106	UPS	1,00	730.000,00	730.000,00	-
107	UPS	1,00	730.000,00	730.000,00	-
108	UPS	1,00	730.000,00	730.000,00	-
109	UPS	1,00	730.000,00	730.000,00	-
110	UPS	1,00	730.000,00	730.000,00	-
111	UPS	1,00	820.000,00	820.000,00	-
112	UPS	1,00	820.000,00	820.000,00	-
113	UPS	1,00	820.000,00	820.000,00	-
114	UPS	1,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
115	UPS	1,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
116	UPS	1,00	1.300.000,00	1.300.000,00	-
117	UPS	1,00	1.001.000,00	1.001.000,00	-
118	UPS	1,00	1.001.000,00	1.001.000,00	-
119	UPS	1,00	830.000,00	830.000,00	-
120	UPS	1,00	1.233.000,00	1.233.000,00	-
121	UPS	1,00	1.233.000,00	1.233.000,00	-
122	UPS	1,00	372.500,00	372.500,00	67.300,00
123	UPS	1,00	372.500,00	372.500,00	67.300,00
124	UPS	1,00	733.000,00	733.000,00	242.000,00
125	UPS	1,00	1.407.000,00	1.407.000,00	-
126	Printer	1,00	1.443.000,00	1.443.000,00	-
127	Printer Multifungsi	1,00	2.096.000,00	2.096.000,00	-
128	Printer Multifungsi	1,00	2.096.000,00	2.096.000,00	-
129	Printer Multifungsi	1,00	3.830.000,00	3.830.000,00	-
130	Printer Multifungsi	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-
131	Printer	1,00	1.930.000,00	1.930.000,00	-
132	Printer	1,00	7.740.000,00	7.740.000,00	-
133	Printer Multifungsi	1,00	2.914.000,00	2.914.000,00	-
134	Printer dan scanner	1,00	4.300.000,00	4.300.000,00	1.000.000,00
135	Printer dan scanner	1,00	8.023.000,00	8.023.000,00	-
136	Printer Multifungsi	1,00	3.233.000,00	3.233.000,00	-
137	Printer Multifungsi	1,00	3.230.000,00	3.230.000,00	-
138	Asli Lembar Test/evaluasi	1,00	2.200.022,00	1.140.000.000,00	-
139	Stationery printing kit	1,00	2.200.022,00	60.730.373,00	-
	JUMLAH	172,00	1.000.200,00		1.423.047.323,00

5.4.3.1 Akaun Untuk Dikonversi/Revisi Rp8.820.683.046,00

Akaun untuk dikonversi/revisi pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah sebesar Rp8.820.683.046,00. Akaun untuk dikonversi/revisi terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1	EK Persewaan	0,00	2.100.000,00
2	EK Asst	142.682.380,00	0,00
3	EK PPKD	8.677.991.146,00	10.822.389.090,00
4	EK SKPD	0,00	(817.818.389,00)
	JUMLAH	8.820.683.046,00	10.506.148.701,00

5.4.3.2 EK Persewaan Rp0,00

EK Persewaan pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dengan nilai tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1	Muatan Monev barang persewaan dan DPLPB	0,00	2.100.000,00
	JUMLAH	0,00	2.100.000,00

5.4.3.3 EK Asst Rp142.682.380,00

EK Asst pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah senilai Rp142.682.380,00 dengan nilai tersebut terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1	Mutasi dari DPLPB No BA 000.2.3.2.116 tanggal 27 Desember 2023 berupa: Kebudayaan Atap Gedung Pusat JKH	(142.682.380,00)	0,00
	JUMLAH	142.682.380,00	0,00

5.4.3.4 RK PPKD Rp2.677.000.546,00

RK PPKD pada pada Dinas Perhubungan Tahun 2024 adalah senilai Rp2.677.000.546,00 adapun nilai tersebut berasal dari mutasi RK PPKD

No	Uraian	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1.	SILPA LRA	2.679.716.546,00	11.202.907.900,00
2.	Partisipasi 31 Des 2023 yang diatur tanggal 2 Jan 2024	2.705.000,00	2.705.000,00
3	BN-SAPD	0,00	617.018.500,00
	JUMLAH	2.677.000.546,00	10.822.630.900,00

5.4.4 EKUITAS AKHIR Rp5.847.200.315,31

Ekuitas akhir sebesar Rp5.847.200.315,31 adalah jumlah status awal setelah dikurangi Surplus/Defisit-LD serta penutupan lain-lain pada tingkat kamatif perubahan kebijakan keuangan mendasar dan RK PPKD. Ekuitas akhir ini akan menjadi status pada saldo awal teraca tahun 2024.

No	Uraian	Jumlah 2024 (Rp)	Jumlah 2023 (Rp)
1	Ekuitas Awal	6.134.065.600,26	6.165.312.561,02
2	Surplus/Defisit - LD	(6.645.968.210,95)	(9.827.997.502,36)
	Dampak Kamatif Perubahan Kebijakan Keuangan Mendasar		
3	Koreksi Nilai Penambahan	0,00	0,00
4	Koreksi Ekuitas Awal	0,00	0,00
5	Lain-lain	(1.380.216,00)	0,00
6	Nilai untuk dikomunikasikan	8.929.683.046,00	10.746.894.560,00
	Ekuitas Akhir	5.847.200.315,31	Rp6.674.955.628,26

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Organisasi Dan Tata Kerja OPD Tahun 2024

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Salatiga dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan, Nomenklatur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas perantara.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan Kota Salatiga memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kebijakan, Nomenklatur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
 - a. Seksi Manajemen dan Kebijakan Lalu Lintas;
 - b. Seksi Renc. Keselamatan dan Keterlaksanaan Lalu Lintas;
4. Bidang Angkutan dan Keluhan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Angkutan dan Terminal;
 - b. Seksi Keluhan Masyarakat;
 - c. Kantorpek. Layanan Pengaduan



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsional Dinas Perbukudan Kota Soligaga didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 60 (lima puluh delapan) orang, yang terdiri dari:

1. PNS = 27
2. PPPK = 1
3. Non PNS = 32

Adapun data rekrutan pegawai pada Dinas Perbukudan Kota Soligaga sebanyak 60 pegawai yang terdiri dari 17 PNS, 1 PPPK, 22 Non PNS. Dengan jumlahnya tugas yang dijalankan oleh Dinas Perbukudan Kota Soligaga dengan Sumber Daya Manusia (saya 60 personel), maka jumlah tersebut kurang memadai. Adapun kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1 : Data rekrutan pegawai pada Dinas Perbukudan Kota Soligaga

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	PPPK	Non PNS	
1	SD Soligaga	-	-	-	-
2	SMP Soligaga	-	-	-	-
3	SMA Soligaga	9	-	14	23
4	D1	1	-	1	2
5	D2	10	1	1	12
6	D4/S1	10	-	8	18
7	D2	1	-	-	1
	Jumlah	37	1	22	60

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Perbukudan Kota Soligaga mayoritas berpendidikan SMA yaitu sebanyak 23 orang yang terdiri dari 9 orang PNS, 14 orang Non PNS.

Selanjutnya jumlah pegawai Dinas Perbukudan Kota Soligaga berdasarkan Golongan Ruang dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 6.2 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	14
3	Golongan III	10
4	Golongan IV	4
	JUMLAH	37

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pegawai pada Dinas Perbukudan Kota Soligaga

berdasarkan golongan ruang yaitu golongan IV sebanyak 4 pegawai, golongan III sebanyak 19 personal, golongan II sebanyak 14 pegawai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Salatiga bergolongan ruang III (Penas) dan II (Pengantar).

6.1 **Konsep Strategi OPD**

Dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul, Dinas Perhubungan Kota Salatiga sesuai tugas dan fungsinya yang mempunyai tujuan, sasaran dan indikator sasaran jangka menengah sebagai berikut:

1. **Tujuan**

Memangkatkan Kualitas Lingkungan Hidup diarea Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

2. **Indikator Tujuan**

- a. Baso Kondisinya
- b. Kinerja Laju Lintas

3. **Sarana**

Memangkatnya kuantitasnya, kualitas, kelengkapan, dan keamanan laju lintas dan jalan

4. **Indikator Sarana**

- a. Baso Terk. Trayek
- b. Persentase Kapasitas KKM Angkutan Umum
- c. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kepadatan

5. **Program**

- a. Program Penunjang Utusan Penertiban Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Program Penyelenggaraan Laju Lintas dan Angkutan Jalan

6. **Indikator Program**

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- b. Persentase layanan angkutan darat (IKP)
- c. Persentase Rambu-rambu terpasang (IKP)

Dalam rangka pencapaian tercapainya indikator kinerja serta kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Kota Salatiga, maka rencana kinerja tahun 2024 berupa program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 6.3. Program-program dan kegiatan kegiatan Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN
1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah Kabupaten Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan, Praganggras, dan Validasi Konsep Peringkat Daerah2. Administrasi Kemangan Peringkat Daerah3. Administrasi Ruang MDA Daerah pada Peringkat Daerah4. Administrasi Kependudukan Peringkat Daerah5. Administrasi Unsur Peringkat Daerah6. Pengujian Ruang MDA Daerah Peningkatan Unsur Perencanaan Daerah7. Penyediaan Jasa Peningkatan Unsur Perencanaan Daerah8. Perencanaan Ruang MDA Daerah Peningkatan Unsur Perencanaan Daerah9. Peningkatan Organisasi
2. Peningkatan Laku Lintas dan Angkasa Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Rencana Sekali Jaringan LLAJ Kabupaten Kota2. Penyediaan Peningkatan Jalan di Jalan Kabupaten Kota3. Penyelidikan Terhadap Peningkatan Tipe C4. Prerogatif Berhala Keselamatan Bersepeda5. Pelaksanaan Menajemen dan pelayanan Laku Lintas sekali Jaringan Jalan Kabupaten Kota6. Peningkatan Efisiensi Unsur Jaringan Tersebut Perbaikan Jalur 1 tonal Daerah Kabupaten Kota7. Peningkatan Jasa Peningkatan Angkasa Unsur Jalur Tersebut Laku Lintas Daerah Kabupaten Kota Jalur 1 (Tonal) Daerah Kabupaten Kota

6.3 Informasi Non Keuangan Lainnya

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Salatiga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Permasalahan terkait Sekretariat

- a. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas SDM perhubungan;
- b. Kurang relevansinya infrastruktur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan, monitoring, dan evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan;

2. Permasalahan Bidang Laku Lintas

- a. Peningkatan kesadaran pribadi sangat penting setiap tahun tanpa dibarengi dengan peningkatan aksesibilitas, pemertanian jaringan jalan sehingga terdampak pada kenyamanan lalu lintas, polisi daerah, meningkatnya angka kecelakaan;



- d. Pemasaran parkir yang kurang terarah serta belum ada pertimbangan dan kebutuhan masyarakat akan teknologi digital termasuk dalam pengalihan dan transportasi peningkatan tarif bus parkir;
- e. Kurangnya fasilitas parkir bagi perbatasan : Hotel, Rumah-rumah, pembatas jalan dan lain-lain. Terutama untuk infrastruktur yang berupa halte penumpang;
- f. Rendahnya tingkat disiplin masyarakat dalam menggunakan kendaraan;
- g. Masih kurangnya sarana pergaratan lah lanta berbasis teknologi informasi;
- h. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkendali serta melanda dampak kemacetan lah lanta, polusi udara dan bunyi dikemacetan;
- i. Terbatasnya ruang parkir baik di tepi jalan maupun tempat khusus parkir, sehingga permintaan terus meningkat.

3. Permasalahan Bidang Keluhan dan Angkutan

- a. Peningkatan kendaraan sangat pesat setiap tahun;
- b. Alat uji kendaraan bermotor yang sudah melebihi umur teknis (di atas 15 tahun);
- c. Aplikasi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKU) belum optimal;
- d. Persebaran angkutan umum masih manual dan pelayanan masih kasar;
- e. Banyaknya angkutan yang milik atau pelanggan perorangan;
- f. Perkembangan jumlah gara-gara bus tanpa diimbangi dengan peningkatan aksesibilitas;
- g. Load factor angkutan kota yang rendah dibawah 30% dan persentase penggunaan kendaraan pribadi semakin tinggi;
- h. Trayek angkutan umum belum mengukuhkan seluruh wilayah kota (4 kecamatan dan 25 kelurahan) (tidak west & feeder);
- i. Belum terdapatnya terminal C yang representatif (terminal untuk pelayanan angkutan kota dan angkutan pedesaan);
- j. Belum terdapatnya terminal angkutan barang atau tempat loading/unloading barang;
- k. Kurangnya halte-fasilitas halte angkutan umum untuk memperlancar kelancaran pelayanan transportasi massal;
- l. Pencemaran lingkungan berupa polusi udara dari cerobong gas buang semakin besar seiring jumlah kendaraan yang meningkat baik roda empat, maupun roda dua.

Dari permasalahan yang ada diatas, beberapa permasalahan pokok dan perubahan yang seharusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan dapat dirangkum dalam Tabel 3.4.

Tabel 6-4. Identifikasi Masalah Urus Perhubungan Kota Solatiga

Masalah Utama	Masalah	Akar Masalah
Kualitas layanan angkutan darat dan perhubungan laut/pelayaran yang layak	Aktif Uji Kelayakan Bersepat yang sudah melebihi umur teknis.	Aktif pengujian Kelayakan belum dipertahankan
	Kurangnya fasilitas pemangku perhubungan	Pembuatan kawasan lalu lintas tidak diikuti dengan pemertahan fasilitas perhubungan
	Belum terdapatnya Terminal Tipe C dan Terminal Busway	Link terancam dalam pemertan perhubungan laut.
	Pengalokasian Penyelenggaraan Parkir	Pengalokasian parkir yang sudah konvensional.
	Pemadatan jumlah program keselamatan pribadi dan keselamatan jumlah program angkutan umum.	Kualitas pelayanan dan angkutan umum yang tidak memadai.
	Kendahnya kapasitas atau ketertarikan patronus untuk angkutan laut.	Kurangnya kesadaran pemilik angkutan busway dan orang untuk menggunakan bus wayah.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungannya yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah digunakan lebih berfokus untuk dibarengkan dengan teknik yang lebih tepat dan merupakan rangkaian kebijakan. Sebagai strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sesuatu yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Strategi yang diarahkan dalam rangka mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi darat melalui pengembangan fasilitas transportasi massal, peningkatan sarana dan prasarana Lalu Lintas, pengalokasian alat uji kelayakan bersepat yang melebihi umur ekonomis dan pelayanan berbasis teknologi
2. Melakukan monitoring dan evaluasi angkutan umum yang wajib uji KIR serta meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan bersepat untuk melakukan uji kelayakan kelayakan;

3. Penataan jaringan trayek dan mengembangkan sistem jaringan transportasi dan mengembangkan SAM (sistem Angkutan Umum Massal) berbasis Sustainable Transport yang terintegrasi dengan agenda pembangunan kawasan strategis sesuai peraturan dan norma.
4. Meningkatkan aplikasi sistem parkir, penyediaan sarana penunjang dan peningkatan SDM pengelola sistem parkir.

Kebijakan yang diambil Dinas Perhubungan Kota Slembi dalam penyelenggaraan dan peningkatan perhubungan meliputi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sarana transportasi berbasis laju lintas, pengadaan bus-bus kota laju lintas dan marka jalan, melakukan audit laju lintas, melakukan pengamatan serta pemetaan bus dan marka jalan, melaksanakan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan, serta pengembangan ATCS.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan Angkutan Umum dan menerbitkan angkutan umum wajib UK.
3. Peningkatan pelayanan berbasis teknologi.
4. Peningkatan pengendalian dan pengamatan laju lintas angkutan jalan.
5. Peningkatan trayek angkutan umum.
6. Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan dan penyediaan fasilitas elit moda yang memadai.
7. Peningkatan kualitas pelayanan prosedur transportasi massa agar terpadu standar teknis guna menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penggunanya seperti pembangunan stop/titik tunggu (halte, terminal tipe C yang representatif, terminal bus) serta mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi.

SAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Perbukuan Kota Salatiga Tahun Anggaran 2024. Catatan atas laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengungkapan Keuangan Daerah. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengungkapan keuangan daerah.

KEPALA DINAS PERBUKUAN
KOTA SALATIGA

Dr. SEU SATUJI, SGM
Pondok Utan Mada
NIP. 19670802 199403 2 007